



Laporan Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro dan Kajian Situasi Terkini Usaha Mikro di Kabupaten Manokwari dan Fak-fak Provinsi Papua Barat

“Program Pembangunan berbasis Masyarakat Fase II:
Implementasi Institusionalisasi Pembangunan Mata
Pencarian yang Lestari untuk Masyarakat Papua”
ILO – PCdP2 UNDP



Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro & Kajian Situasi Terkini tentang Akses ke Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil

di Kabupaten Manokwari dan Fakfak, Papua Barat

**Disusun Oleh: Lembaga Penelitian UNIPA
untuk Proyek Pelembagaan Pembangunan Mata Pencarian
yang Berkelanjutan ILO – PcDP 2 UNDP
2012**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Keluaran Utama	4
II. METODOLOGI PENELITIAN	6
Lokakarya Lintas Sektoral Pemetaan LKM dan Situasi Terkini Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Manokwari dan Fakfak	6
III. ANALISIS KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA KABUPATEN MANOKWARI DAN FAKFAK	11
3.1. Analisis Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Manokwari	11
3.1.1. Kependudukan	11
3.2. Analisis Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Manokwari	14
3.2.1. Kegiatan Perekonomian Kabupaten Manokwari	14
3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari	15
3.2.3. Struktur Perekonomian Kabupaten Manokwari	17
3.2.4. Sistem Pemerintahan Kabupaten Manokwari	19
3.3. Analisis Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Fakfak	20
3.3.1. Kependudukan	20
3.4. Analisis Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Fakfak	21
3.4.1. Kegiatan Perekonomian Kabupaten Fakfak	21
3.4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Fakfak	21
3.4.3. Struktur Perekonomian Kabupaten Fakfak	22
3.4.4. Sistem Pemerintahan Kabupaten Fakfak	24
3.5. Pengelolaan dana Otsus di Kabupaten Manokwari dan Fakfak	25
IV. SITUASI DAN KONDISI TERKINI PENGEMBANGAN DAN AKSES PERMODALAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI MANOKWARI DAN FAKFAK	30



3.1. Kabupaten Manokwari	30
3.1.1. Pengembangan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Manokwari.....	30
3.1.2. Akses ke keuangan/permodalan untuk peningkatan usaha mikro dan kecil bagi masyarakat asli Papua di Manokwari.....	36
3.1.3. Model pengembangan UMK dan Pemberdayaan LKM di Kabupaten Manokwari.....	39
3.2. Kabupaten Fakfak.....	44
3.2.1. Pengembangan Usaha mikro dan kecil di Kabupaten Fakfak	44
3.2.2. Akses ke Keuangan/Permodalan untuk Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil Masyarakat Asli Papua di Fakfak	48
3.2.3. Model pengembangan UMK dan Pemberdayaan LKM di Kabupaten Fakfak ..	52
V. PEMETAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	56
4.1. Lembaga keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Manokwari	56
4.2. Lembaga keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Fakfak.....	60
VI. STUDI KASUS TENTANG KEBUTUHAN PEREMPUAN PENGUSAHA	69
6.1. Studi Kasus Perempuan Pengusaha Kabupaten Manokwari.....	69
6.2. Studi Kasus Perempuan Pengusaha di Kabupaten Fakfak.....	79
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Materi, Narasumber dan Merode Lokakarya di Kabupaten Manokwari.....	8
Tabel 2. Materi, Narasumber dan Merode Lokakarya di Kabupaten Fakfak.....	9
Tabel 3. Sebaran dan Jumlah Penduduk Kabupaten Manokwari Menurut Distrik Tahun 2011	12
Tabel 4. Perkembangan PDRB Kabupaten Manokwari Tahun 2000-2007	15
Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari Tahun 2000-2011	16
Tabel 6. Struktur Perekonomian Kabupaten Manokwari Tahun 2009-2011 (dalam persen)	17
Tabel 7. Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Manokwari Tahun 2005-2011	18
Tabel 8. Sebaran dan Jumlah Penduduk Kabupaten Fakfak Menurut Distrik Tahun 2011	20
Tabel 9. Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Kabupaten Fakfak Tahun 2009 – 2011 .	21
Tabel 10. Peranan Sektor Perekonomian Kabupaten Fakfak terhadap Pembentukan PDRB Tahun 2009-2011	23
Tabel 11. Profil Koperasi Simpan Pinjam yang Terdapat di Manokwari	32
Tabel 12. Perkembangan pelaksanaan Program PUAP di Kabupaten Manokwari	35
Tabel 13. Realisasi Kredit Mikro LKM Bank di Manokwari tahun 2012	36
Tabel 14. Lembaga yang potensial sebagai inkubator bisnis di Kabupaten Manokwari.....	42
Tabel 15. Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah yang diberikan Bank Umum di Kabupaten Fakfak	50
Tabel 16. Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum di Kabupaten Fakfak Menurut Sektor Ekonomi.....	51
Tabel 17. Lembaga yang potensial berperan sebagai Inkubator Bisnis Potensial di Kabupaten Fakfak	53
Tabel 18. Realisasi penyaluran usaha mikro kecil (UMK) Bank Papua Cabang Manokwari.....	57
Tabel 19. Data Debitur dan Jumlah KUR mikro yang disalurkan oleh BRI Cabang Manokwari....	58
Tabel 20. Peta LKM Berdasarkan Kelompok Formalitas di di Kabupaten Fakfak	61



Tabel 21. Peta LKM Semi-formal (Koperasi) di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Distrik.....	63
Tabel 22. Peta LKM di Kabupaten Fakfak berdasarkan Simpanan dan Pinjaman Tahun 2012	66
Tabel 23. Perempuan Pengusaha mikro di Kabupaten manokwari	69
Tabel 24. Perempuan pengusaha mikro di Kabupaten Fakfak.....	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Ekonomi Kabupaten Fakfak Tahun 2009-2011.....	23
Gambar 2.	Skema hubungan fungsional antara Stakeholder dalam Lembaga Pengembangan Keuangan Mikro hasil lokakarya di Kabupaten Manokwari	43
Gambar 3.	Skema hubungan fungsional Stakeholder dan tahapan proses akses kredit LKM di Kabupaten Fakfak.....	54
Gambar 4.	Ibu Ester Kereway dengan kerajinan tangan yang dihasilkan	70
Gambar 5.	Ibu Bebari dengan usaha pembuatan ikan asar	72
Gambar 6.	Ibu Moni Wanma dengan jualan sagu dan bumbu kuah kuning	75
Gambar 7.	Ibu Sarce Rumaseb dengan hasil kerajinan tas	76
Gambar 8.	Ibu Weli Sorbu dengan usaha kios	78
Gambar 9.	Ibu Sara Ahek pelaku usaha kios di Kokas Fakfak.....	80
Gambar 10.	Ibu Marselina Magap pelaku usaha pala dan kios di Fakfak Tengah.....	81
Gambar 11.	Bunga dan biji pala produksi ibu Marselina Magap	82
Gambar 12.	Ibu Marianke Howay pelaku penjual sayur di Pasar Tambaruni Fakfak	83
Gambar 13.	Mama Golyaf dengan hasil olahan sagu lempeng di Kokas Fakfak	85
Gambar 14.	Sagu Lempeng hasil olahan Mama Golyaf	86
Gambar 15.	Produksi Rumput Laut keluarga Mama Golyaf	87



DAFTAR SINGKATAN

Aspap	: Asosiasi Pengusaha Asli Papua
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKD	: Bank Kredit Desa
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
CU	: Credit Union
GAPOKTAN	: Gabungan Kelompok Tani
GEMAPALA	: Gerakan Masyarakat Papua Lestari
ILO	: International Labour Organization
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KSP	: Koperasi simpan Pinjam
KUR	: Kredit Usaha rakyat
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: Milenium Development Goals
NGO	: Non Government Organization
OTSUS	: Otonomi Khusus
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PDRB	: Pendapatan Domestik Regional Bruto
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PUAP	: Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
UMK	: Usaha Mikro Kecil
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UNDP	: United Nation Development Program
UNIPA	: Univeritas Negeri Papua
USP	: Usaha Simpan Pinjam
YMH	: Yayasan Mitra Hired



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah Papua, yang meliputi dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat, merupakan wilayah terbesar di Indonesia tapi paling jarang penduduknya dengan jumlah 3,6 juta jiwa, yang terdiri dari lebih dari 250 suku dan kelompok etnis (2010) dengan perbandingan setidaknya 73% masyarakat asli Papua mendiami daerah-daerah pedesaan. Untuk Provinsi Papua Barat, jumlah penduduk hingga sensus BPS Tahun 2011 adalah sebanyak 789.013 jiwa, yang tersebar di 11 kabupaten/kota.

Potensi sumberdaya alam Provinsi Papua dan Papua Barat sangat berlimpah adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Jika dikelola dengan sebaik-baiknya akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Papua baik generasi sekarang maupun yang generasi yang akan datang. Namun dibalik fakta bahwa kawasan ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tingkat kemiskinannya melebihi dua kali lipat tingkat kemiskinan rata-rata nasional dan merupakan yang tertinggi di negara ini, dengan angka 34,88% untuk Papua Barat dan 36% untuk Papua (*Laporan Pencapaian MDGs Indonesia 2010, Bappenas*). Kedua provinsi ini juga merupakan provinsi yang tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, terlihat pada indikator-indikator non-pendapatan utama dari Milenium Development Goals (MDGs). Dengan tingkat partisipasi murni di tingkat pendidikan dasar yang kurang dari rata-rata nasional dan ketidaksetaraan gender, situasi ini menyebabkan terbatasnya akses bagi kaum muda dan perempuan terhadap mata pencaharian.

Kenyataan tersebut menjadi sebuah paradoks dengan besarnya anggaran pemerintah yang dikururkan setiap tahunnya ke Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengejar ketertinggalan tersebut dari provinsi lainnya. Diperlukan mekanisme



pembiayaan yang tepat dan berkeadilan bagi masyarakat papua yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proyek “Institusionalisasi Pembangunan Mata Pencaharian yang Berkelanjutan” yang merupakan bagian dari komponen Program Pembangunan Berpusat Masyarakat (*People-centred Development Programme* atau PcDP) didanai oleh Pemerintah New Zealand dan dilaksanakan oleh UNDP dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dengan tujuan untuk memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Asli Papua dengan mengoptimalkan sistem dan potensi dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil dan proses-proses pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan di wilayah Papua.

Di akhir keterlibatan para pemangku kepentingan akan melanjutkan untuk menggunakan informasi pasar tenaga kerja yang sistematis dan relevan guna memberikan layanan pengembangan usaha kepada masyarakat, yang mencakup; (1) Mendukung pengembangan usaha lokal yang potensial di Papua dan Papua Barat; (ii) Memfasilitasi kelompok-kelompok usaha lokal untuk memperoleh akses ke keuangan; (3) Membentuk Pusat Pelayanan Pengembangan Usaha Mikro/Business Development Services Provider/Inkubasi Bisnis.

Survei yang dilakukan oleh Tim Peneliti UNIPA Tahun 2010 terhadap 84 orang responden pengusaha asli Papua di Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa hanya terdapat 18 orang atau 21% responden yang mempunyai akses pinjaman ke Lembaga Keuangan Formal. Bahkan untuk Kabupaten Fakfak, dari 29 orang responden pengusaha asli Papua yang disurvei, tidak ada yang mempunyai akses pinjaman modal usaha ke Lembaga Keuangan Formal. Penyebab sulitnya akses pengusaha asli Papua ke Lembaga Keuangan dapat berbagai faktor, antara lain keterbatasan informasi mengenai produk pembiayaan usaha mikro oleh lembaga keuangan, sulitnya memenuhi persyaratan kredit yang ditetapkan oleh lembaga keuangan, ketidakmampuan untuk



memenuhi kewajiban pinjaman, dan berbagai faktor lainnya. Untuk diperlukan solusi bagi permasalahan-Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperlukan model bagi akses keuangan usaha mikro kecil yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi pengusaha asli Papua.

Melalui kerjasama dengan Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Universitas Negeri Papua, ILO-UNDP melalui proyek ini akan menyelenggarakan “Rangkaian Kegiatan Pemetaan dan Kajian tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Situasi Terkini Pengembangan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Manokwari dan Fakfak” guna menyediakan informasi yang sistematis dan relevan mengenai mata pencaharian, pengembangan ekonomi lokal, pengembangan usaha dan keuangan mikro di Kabupaten Fakfak dan Manokwari.

Hasil dari kajian yang berupa laporan sistematis tentang Akses ke Keuangan dan Pengembangan Usaha di Papua Barat akan dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan terkait sebagai acuan untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka memberikan layanan pengembangan usaha kepada masyarakat.

1.2. Tujuan

1. Untuk memberikan gambaran umum tentang situasi dan kondisi terkini tentang pengembangan ekonomi lokal dan akses ke keuangan bagi masyarakat asli Papua di Provinsi Papua Barat khususnya di kabupaten Manokwari dan Fakfak ; termasuk informasi tentang praktik-praktik terbaik dan pendekatan untuk mengembangkan usaha lokal untuk masyarakat asli Papua dan informasi tentang efektifitas pemanfaatan dana Otonomi Khusus (OTSUS) untuk meningkatkan usaha lokal dan akses ke keuangan;
2. Untuk memetakan Lembaga-Lembaga Keuangan Mikro/LKM (pemerintah dan swasta, termasuk koperasi, *credit* union, lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, cabang-cabang bank komersial pemberi kredit mikro). Pemetaan ini akan mencakup situasi dan kondisi pengembangan Usaha Kecil Menengah yang



terkait dengan akses ke keuangan, skema-skema mikrokredit dan metode penyaluran, layanan-layanan dan produk-produk lainnya yang ditawarkan kepada para nasabah (tidak terbatas pada pemberian pinjaman), jumlah nasabah, profil para nasabah, dan besarnya pinjaman yang diberikan;

3. Untuk menilai kelayakan akses terhadap bantuan keuangan dan mengidentifikasi permintaan (kelompok-kelompok yang potensial/sektor-sektor untuk peminjaman) dan penawaran (pemilihan berbasis LKM berdasarkan laporan pemetaan). Kondisi-kondisi dan mekanisme untuk memperluas layanan-layanan saat ini atau/dan ke diversifikasi layanan/produk mereka;
4. Untuk melakukan pemetaan dan kajian pelingkupan (*scoping study*), termasuk menilai lembaga pusat inkubasi usaha yang sudah ada dan menganalisa potensi dan kapasitas lembaga-lembaga tersebut, serta jenis layanan yang diberikannya.

1.3. Keluaran Utama

Di akhir kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan:

1. Informasi yang detil tentang situasi dan kondisi terkini tentang mata pencaharian, pengembangan ekonomi lokal dan akses ke keuangan bagi masyarakat asli Papua di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Manokwari;
2. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penyampaian dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait mata pencaharian dan keuangan mikro dengan memperkuat koordinasi, pemantauan dan sinergi program;
3. Laporan tertulis dan kajian lengkap dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tentang pemetaan lembaga-lembaga keuangan, penilaian kelayakan terhadap akses ke bantuan keuangan, penilaian lembaga-lembaga yang sudah ada dan kapasitas mereka sebagai pusat pengembangan usaha;
4. Sebuah studi kasus tentang kebutuhan perempuan pengusaha Papua;



5. Sebuah catatan dan laporan lengkap dalam Bahasa Inggris tentang implementasi kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang akan disajikan oleh konsultan dengan arahan dari Koordinator Provinsi ILO.



II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dalam berbagai 2 bentuk yaitu pertama, lokakarya untuk menyerap informasi dan masukan *stakeholder* terkait yang terdiri atas pemerintah melalui SKPD terkait dengan pengembangan usaha mikro kecil, Pelaku LKM (Bank, koperasi, Credit Union), pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), LSM, perguruan tinggi. Metode kedua adalah observasi terhadap *stakeholder* tertentu untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan pengembangan UMK dan profil lembaga keuangan yang bergerak dalam penyaluran kredit mikro kecil bagi dunia usaha.

Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan meliputi :

1. Mitra Pelaksana melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dan BAPPEDA Kabupaten Fak-fak dan Manokwari akan membantu persiapan dan koordinasi untuk seluruh kebutuhan logistik dan administrasi workshop (persiapan administrasi dan logistik sebelum dan selama workshop);
2. Pelaksanaan workshop partisipatif akan dihadiri oleh para pemangku kepentingan kunci terutama dari Papua dan wilayah sekitarnya (konteks wilayah);
3. Rangkaian kegiatan pemetaan dan kajian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) akan dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Papua Manokwari.

Lokakarya Lintas Sektoral Pemetaan LKM dan Situasi Terkini Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Manokwari dan Fakfak

Tujuan pelaksanaan Lokakarya lintas sektoral di kabupaten Manokwari dan Fakfak adalah untuk mendapatkan gambaran umum terkait dengan informasi-informasi



yang berhubungan dengan pemetaan dan situasi terkini perkembangan UMK dan akses ke keuangan, yang meliputi:

- a. Gambaran umum jenis LKM dan kondisi terkini: visi, misi, kinerja kelembagaan, kinerja keuangan, model skim kredit dan *success story*.
- b. Gambaran umum pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan akses masyarakat terhadap LKM: kondisi UMKM yang dilayani, jenis usaha nasabah, dll.
- c. Informasi tentang Akses Permodalan atau Akses ke Keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya masyarakat asli Papua dan kaum perempuan; Termasuk jenis ataupun bentuk sumber keuangan atau permodalan untuk usaha yang saat ini dimanfaatkan atau diakses oleh masyarakat (dalam hal ini termasuk simpan pinjam non formal, sistem ijon, ataupun simpan pinjam tradisional)
- d. Kebijakan/regulasi dari pemerintah/dinas terkait yang mendukung LKM dan UMKM.
- e. Program utama ataupun pendukung dari dinas terkait yang berkaitan dengan LKM dan UMKM.
- f. Kebijakan penganggaran Otsus yang mendukung LKM dan UMKM.
- g. Program peningkatan sumberdaya manusia (*capacity building*) yang dimiliki dinas terkait untuk penguatan LKM dan UMKM.
- h. Bentuk-bentuk koordinasi yang dilakukan oleh dinas terkait.
- i. Efektifitas penggunaan dana OTSUS yang diperuntukan untuk pengembangan UMKM. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta potensi untuk mengatasi masalah tersebut

Lokakarya lintas sektoral di Kabupaten Manokwari dilaksanakan selama 2 hari, dari tanggal 7-8 November 2012 yang dihadiri oleh peserta sebanyak 30 orang dari berbagai unsur seperti pemerintah kabupaten (Bappeda, Dinas Pertanian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas perikanan dan Kelautan), LSM (Perdu), Pelaku usaha asli Papua (UMK, Aspap), LKM (BPR Arfindo, CU Mambuin, KSP Empat



Bersaudara), Perguruan Tinggi (UNIPA), Media Massa (Harian Media Papua) dan lain-lain. Materi, narasumber dan metode pelaksanaan lokakarya disajikan melalui Tabel 1.

Tabel 1. Materi, Narasumber dan Metode Lokakarya di Kabupaten Manokwari

No	Materi	Nara Sumber	Metode
1	Situasi dan kondisi terkini tentang pengembangan ekonomi lokal (baik regulasi ataupun program) serta efektivitas pemanfaatan dana otonomi khusus untuk meningkatkan usaha mikro dan kecil	Bappeda dan Diperindagkop Kabupaten Manokwari	Talkshow Panel
2	Situasi dan kondisi terkini tentang akses ke keuangan/permodalan untuk peningkatan usaha mikro dan kecil bagi masyarakat asli Papua.	BPR Arfindo, CU Mumbuin, KSP Empat bersaudara	Talkshow panel
3	Analisa permasalahan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat untuk masyarakat asli Papua dan Analisa kesenjangan (<i>gap analysis</i>) atas kondisi yang dialami para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.	para pelaku UMK, akademisi, LSM, lembaga pemerintahan, dan LKM	<i>Group Discusion</i>

Adapun Lokakarya di Kabupaten Fakfak diselenggarakan pada tanggal 21-22 November 2013, yang dihadiri peserta sebanyak 60 orang dari berbagai unsur seperti Pemerintah (Bappeda, Dinas Pertanian, Disperindagkop, Dinas perikanan dan kelautan, dll), LSM (Gemapala), Pelaku UMK Papua, LKM (BRI, Bank Papua, YMH), dll. Sebanyak 3 orang peserta yang merupakan pengurus Koperasi Syangga dari Distrik Kokas, kedatangan oleh pelaksana untuk mengikuti kegiatan lokakarya di Fakfak. Materi, narasumber dan metode pelaksanaan lokakarya disajikan melalui Tabel 2.



Tabel 2. Materi, Narasumber dan Metode Lokakarya di Kabupaten Fakfak

No	Materi	Nara Sumber	Metode
1	Situasi dan kondisi terkini tentang pengembangan ekonomi lokal (baik regulasi ataupun program) serta efektivitas pemanfaatan dana otonomi khusus untuk meningkatkan usaha mikro dan kecil	Bappeda dan Diperindagkop	Talkshow Panel
2	Situasi dan kondisi terkini tentang akses ke keuangan/permodalan untuk peningkatan usaha mikro dan kecil bagi masyarakat asli Papua.	BRI, Bank Papua dan Yayasan Mitra Hired (YMH)	Talkshow panel
3	Analisa permasalahan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat untuk masyarakat asli Papua dan Analisa kesenjangan (<i>gap analysis</i>) atas kondisi yang dialami para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.	para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, akademisi, LSM, lembaga pemerintahan, dan LKM	<i>Group Discussion</i>

Melalui Lokakarya tersebut, diperoleh berbagai informasi dari para narasumber. Setelah semua informasi tersebut terkumpulkan, kemudian peserta diminta untuk mengidentifikasi dan menganalisis gap penghambat pelaksanaan penerapan keuangan mikro berdasarkan fungsi dan peran lembaga mereka masing-masing. Untuk dapat melakukan peran tersebut, peserta dikelompokkan menjadi tidak tiga kelompok, yaitu pemerintah, perbankan/LKM dan LSM/asosiasi/ perguruan tinggi. Menggunakan panduan pertanyaan yang telah disesuaikan dengan peran dan fungsi lembaga, setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi berbagai gap yang selama ini menghambat tujuan mereka dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Hambatan-hambatan yang teridentifikasi tersebut kemudian dianalisis secara bersama-sama dengan sudut pandang dan mandat lembaga. Analisis gap tersebut



kemudian melahirkan draft alternatif-alternatif aksi yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Agar dapat melaksanakan alternatif-alternatif aksi tersebut, kemudian disepakati secara bersama-sama untuk dibentuk Tim Inti yang terdiri dari unsur pemerintah, LSM, Asosiasi/Swasta dan Koperasi. Tim ini akan berperan sebagai motivator dan pembangun bagi lembaga yang harusnya mengupayakan pemecahan gap penghambat tersebut.



III. ANALISIS KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA KABUPATEN MANOKWARI DAN FAKFAK

3.1. Analisis Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Manokwari

3.1.1. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Manokwari tahun 2011 berjumlah 194.948 jiwa. Dengan jumlah penduduk pria sebanyak 102.719, sedangkan sisanya sebesar 92.229 adalah penduduk wanita. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya (2010) berjumlah 187.726 jiwa atau bertumbuh sebesar 3,70%. Dengan pertumbuhan tersebut maka penduduk Kabupaten Manokwari dapat dikatakan mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manokwari tidak terlepas dari semakin strategisnya kota Manokwari baik secara ekonomi maupun secara politis, yaitu karena situasi dan kondisi yang semakin kondusif serta adanya pemekaran kabupaten dalam provinsi yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Manokwari (Kabupaten Manokwari Selatan dan Pengunungan Arfak). Jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Manokwari menurut distrik dapat dilihat pada Tabel 3.



Tabel 3. Sebaran dan Jumlah Penduduk Kabupaten Manokwari Menurut Distrik Tahun 2011

NO	DISTRIK	LUAS AREA (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	RUMAH TANGGA	KEPADATAN (Jiwa/Km ²)
1.	Ransiki	1.180,20	7705	1788	7
2.	Momi Waren	440,00	2036	538	5
3.	Nenei	436,18	1196	259	3
4.	Tahota	407,44	583	138	1
5.	Sururey	178,22	2527	924	14
6.	Didohu	176,04	1555	463	9
7.	Dataran Isim	214,89	2075	513	10
8.	Anggi	256,80	2031	475	8
9.	Taige	112,13	1306	295	12
10.	Anggi Gida	199,41	1296	285	6
11.	Membey	49,58	1068	217	22
12.	Oransbari	362,95	5024	1315	14
13.	Warmare	598,14	6210	1485	10
14.	Prafi	388,00	14282	3768	37
15.	Minyambouw	335,70	6264	1922	19
16.	Hink	365,08	5424	1739	15
17.	Catubouw	373,72	1863	465	5
18.	Manokwari Barat	237,24	80606	17761	340



NO	DISTRIK	LUAS AREA (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	RUMAH TANGGA	KEPADATAN (Jiwa/Km ²)
19.	Manokwari Timur	154,84	9298	1611	60
20.	Manokwari Utara	622,79	2312	565	4
21.	Manokwari Selatan	542,07	13714	3327	25
22.	Testega	497,84	828	202	2
23.	Tanah Rubuh	481,19	2122	507	4
24.	Kebar	1.620,60	2028	497	1
25.	Senopi	1.082,40	757	175	1
26.	Amberbaken	1000,87	1883	434	2
27.	Mubrani	508,13	671	170	1
28.	Masni	1.406,10	13745	3693	10
29.	Sidey	219,95	4539	1148	21
	TOTAL	14.448,50	194948	46679	13

Sumber : Kabupaten Manokwari dalam Angka 2012, BPS

Penduduk terbanyak terdapat di distrik Manokwari Barat sebanyak 41,35% dan terbanyak kedua dan ketiga adalah distrik Prafi dan distrik Masni masing-masing sebesar 7,33% dan 7,05%. Selebihnya tersebar pada 26 distrik lainnya. Kepadatan penduduk tertinggi adalah distrik Manokwari Barat, menyusul distrik Manokwari Timur dan distrik Prafi.



3.2. Analisis Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Manokwari

3.2.1. Kegiatan Perekonomian Kabupaten Manokwari

Aktivitas perekonomian di Kabupaten Manokwari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya mobilitas barang dan jasa setelah daerah ini menjadi ibukota Provinsi Papua Barat sejak tahun 2002. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya di berbagai sektor ekonomi dan pada semua skala usaha baik mikro, kecil, menengah maupun pada skala besar. Hal ini memberikan implikasi pada semakin terbukanya lapangan kerja, berkurangnya angka pengangguran yang akhirnya dapat memberikan efek pada peningkatan taraf hidup rakyat.

Secara umum perkembangan ekonomi di Kabupaten Manokwari selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan, meskipun masih fluktuatif dari tahun ke tahun. Sekalipun ada sektor yang mengalami kontraksi, tetapi kecenderungannya mulai membaik dan secara umum tidak mempengaruhi pertumbuhan agregat karena masih banyaknya sektor yang menunjukkan kinerja positif.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2000 (sebagai tahun dasar) hingga tahun 2011 telah mengalami perkembangan cukup pesat. Selama kurun waktu 11 tahun (2000-2011), PDRB Kabupaten Manokwari atas dasar harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 5,9 kali lipat (Rp 566,08-Rp 3.337,65 juta) dan atas dasar harga berlaku berkembang sebesar 2,3 kali lipat atas dasar harga berlaku (Rp 566,08-Rp 1.317,96 juta). Besarnya perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dengan atas dasar konstan yang mencerminkan besarnya perkembangan harga-harga (inflasi) tahun 2000-2011, disajikan pada Tabel 4.



Tabel 4. Perkembangan PDRB Kabupaten Manokwari Tahun 2000-2007

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000	
	Nilai (Jutaan Rupiah)	Perkembangan (%)	Nilai (Jutaan Rupiah)	Perkembangan (%)
2000	566.076,86	100,00	566.076,86	100,00
2001	656.077,51	115,90	596.903,96	105,45
2002	774.242,41	136,77	637.320,26	119,47
2003	898.611,22	158,74	676.320,27	119,47
2004	1.032.516,30	182,40	720.891,81	127,35
2005	1.197.553,55	211,55	772.414,91	136,45
2006	1.401.718,99	247,62	831.098,38	146,82
2007	1.672.598,50	295,47	904.559,08	159,79
2008*	2.176.455,71	384,48	996.794,23	176,09
2009*	2.560.979,59	452,41	1.097.354,94	193,85
2010*	2.946.678,12	520,54	1.207.806,42	213,36
2011**	3.337.648,63	589,61	1.317.964,69	232,82

Sumber : PDRB Kabupaten Manokwari Tahun 2012

Keterangan: *Angka diperbaiki ** Angka Sementara

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari

Besarnya laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan khususnya pembangunan bidang ekonomi. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian,



sebaliknya bila negatif menunjukkan penurunan. Tabel 5 berikut ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari tahun 200-2011.

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari Tahun 2000-2011

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (%)	Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)
2001	15,90	5,45
2002	18,01	6,87
2003	16,06	6,03
2004	14,90	6,59
2005	15,98	7,15
2006	17,05	7,60
2007	19,32	8,84
2008*	30,12	10,20
2009*	17,67	10,09
2010*	15,06	10,07
2011**	13,27	9,12

Sumber : PDRB Kabupaten Manokwari Tahun 2012

Keterangan: *Angka diperbaiki ** Angka Sementara

Secara makro, pertumbuhan ekonomi dilihat dari laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga konstan 2000. Penggunaan atas dasar harga konstan ini dikarenakan pengaruh harga telah dikeluarkan sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari selama 11 tahun terakhir yaitu dari tahun 2001 sampai dengan 2011 selalu mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8% setiap tahunnya.



3.2.3. Struktur Perekonomian Kabupaten Manokwari

Struktur perekonomian menjadi penting untuk dibahas, karena dengan mengetahui struktur perekonomian suatu daerah maka kita dapat mengetahui sektor-sektor yang mendominasi perekonomian suatu daerah. Sektor-sektor dominan tersebut dijadikan sebagai *leading sector* yang pengaruhnya sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga sedikit saja perubahan terjadi pada *leading sector* akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Besarnya sumbangan dari sektor-sektor dominan terhadap perekonomian Kabupaten Manokwari disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Struktur Perekonomian Kabupaten Manokwari Tahun 2009-2011 (dalam persen)

NO	SEKTOR	2009*	2010*	2011**
1.	Pertanian	29,30	27,61	25,81
2.	Pertambangan dan Penggalan	1,85	1,87	2,12
3.	Industri Pengolahan	3,24	3,11	2,99
4.	Listrik dan Air Bersih	0,84	0,88	0,85
5.	Bangunan	19,16	19,88	21,15
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,26	15,17	15,82
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	9,52	9,44	9,29
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,48	5,27	5,53
9.	Jasa-jasa	16,36	16,77	16,43
Total		100,00	100,00	100,00

Sumber : PRDB Kabupaten Manokwari 2012

Keterangan: *Angka diperbaiki ** Angka sementara



Melalui Tabel 6 dapat diketahui bahwa sektor pertanian masih sangat dominan, walaupun kontribusinya mengalami penurunan, yang berarti bahwa peranan sektor lain mulai mengalami peningkatan. Namun demikian sektor pertanian akan tetap menjadi sektor andalan mengingat potensi sumberdaya alam yang berupa lahan-lahan pertanian masih berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Manokwari.

Tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah dapat diukur dari berbagai indikator, salah satunya adalah PDRB per kapita yang biasanya digunakan untuk membandingkan kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Namun demikian, pendekatan melalui PDRB per kapita masih amat prematur untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah, karena besaran PDRB tidak dimiliki secara merata oleh penduduk, tetapi hanya dimiliki oleh penduduk yang mempunyai akses terhadap perekonomian. Pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten Manokwari, disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Manokwari Tahun 2005-2011

Tahun	PDRB Per Kapita Atas dasar Harga Berlaku		
	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Perkembangan (%)
2005	7.696.903,72	-	182,46
2006	8.667.781,70	12,61	205,48
2007	9.952.981,28	14,83	235,94
2008*	12.466.238,84	25,25	295,52
2009*	14.122.296,37	13,28	334,78
2010*	15.696.696,87	11,15	372,10
2011**	17.135.215,25	9,16	406,20

Sumber : PDRB Kabupaten Manokwari Tahun 2012

Keterangan : *Angka diperbaiki **Angka sementara



PDRB perkapita Kabupaten Manokwari tahun 2011 yaitu sebesar 17,14 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2010, PDRB perkapita tahun 2011 telah mengalami perkebangan sebesar empat kali lipat. Pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2011 lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2010. Namun demikian pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2011 sebesar 9,16% masih tergolong tinggi.

Berdasarkan kelompok sektor, nilai tambah terbesar pada tahun 2011 terbentuk pada sektor tersier, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan sektor jasa-jasa. Sektor ini memberikan nilai tambah sebesar Rp 609.811,81 juta. Di tempat kedua adalah sektor primer seperti sektor pertanian dan pertambangan yang memberikan nilai tambah sebesar Rp 420.531,70 juta. Sektor sekunder selanjutnya memberikan nilai tambah sebesar Rp 287.621,18 juta.

3.2.4. Sistem Pemerintahan Kabupaten Manokwari

Kabupaten Manokwari memiliki 29 distrik dengan 9 kelurahan serta 412 kampung/desa. Distrik Menyambow merupakan distrik yang mempunyai jumlah kampung terbanyak yaitu 50 kampung, sedangkan Distrik Manokwari barat mempunyai kelurahan terbanyak yaitu 6 kelurahan.

Kecamatan/Distrik adalah satuan wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan wilayah kerja perangkat pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum, yang langsung di bawah Bupati/Walikota dan membawahi beberapa Desa/Kampung/ Kelurahan. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. **Kelurahan** adalah suatu wilayah lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan (UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Desa/Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal



usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

3.3. Analisis Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Fakfak

3.3.1. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Fakfak tahun 2010 adalah sebanyak 66.828 jiwa yang tersebar di 9 distrik. Sebaran jumlah penduduk, rumah tangga dan kepadatan penduduk di Kabupaten Fakfak disajikan melalui Tabel 8.

Tabel 8. Sebaran dan Jumlah Penduduk Kabupaten Fakfak Menurut Distrik Tahun 2011

NO	DISTRIK	LUAS AREA (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	RUMAH TANGGA	KEPADATAN (Jiwa/Km ²)
1.	Fakfak Barat	1180,20	7705	735	7
2.	Fakfak Timur	440,00	2036	621	5
3.	Fakfak	1685	4122	7650	2
4.	Kokas	1721	2992	918	1
5.	Karas	820	33174	550	40
6.	Fakfak Tengah	1786	4610	1939	2
7.	Kramongmongga	2491	2597	558	1
8.	Teluk Patipi	705	9872	703	14
9.	Bomberay	1478	2737	680	1
	TOTAL	14320	66828	14354	4,67

Sumber : Kabupaten Fakfak dalam Angka 2012, BPS



3.4. Analisis Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Fakfak

3.4.1. Kegiatan Perekonomian Kabupaten Fakfak

Laporan Perekonomian Kabupaten Fakfak 2012 yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Papua menyajikan berbagai indikator ekonomi makro, seperti: pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca perdagangan, investasi, tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kajian yang akan dilakukan tentang kondisi makro ekonomi ini memiliki periode selama tiga tahun terakhir, atau sejak tahun 2009 hingga tahun 2011. Tabel 9 di bawah ini menunjukkan perkembangan beberapa indikator ekonomi di Kabupaten Fakfak periode 2009-2011.

Tabel 9. Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Kabupaten Fakfak Tahun 2009 – 2011

Indikator Ekonomi	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,98	5,91	7,84
2. PDRB Harga Berlaku (juta Rupiah)	1.114.983	1.267.537	1.483.373
3. PDRB Perkapita Harga berlaku	16.136.256	17.460.630	21.654.132
4. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	70,80	71,46	n.a

Sumber : PDRB dan IPM Kabupaten Fakfak Tahun 2012

3.4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Fakfak

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Fakfak menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Fakfak tahun 2009-2011 secara umum di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Fakfak tahun 2009 mencapai 6,98 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,58 persen. Perekonomian Kabupaten Fakfak tahun 2010 mengalami perlambatan mencapai -1,07 persen di banding tahun sebelumnya, padahal saat itu perekonomian nasional mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 6,10 persen. Tahun 2011 perekonomian Kabupaten Fakfak mengalami



pertumbuhan mencapai 7,84 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,5 persen.

Berbeda dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Fakfak yang secara umum berada di atas rata-rata nasional, kinerja perekonomian Kabupaten Fakfak kurang baik dilihat dari PDRB per kapitanya yang secara umum jauh di bawah rata-rata nasional. Tahun 2009, PDRB per kapita Kabupaten Fakfak hanya mencapai 16,14 juta rupiah sementara rata-rata nasional 23,91 juta rupiah. Tahun 2010 PDRB per kapita Kabupaten Fakfak mencapai 17,46 juta rupiah sementara rata-rata nasional 27,08 juta rupiah. Tahun 2011 PDRB per kapita Kabupaten Fakfak mengalami kenaikan menjadi 21,65 juta rupiah namun masih lebih rendah dibandingkan PDRB rata-rata nasional 30,81 juta rupiah. PDRB per kapita Kabupaten Fakfak secara umum lebih rendah dibandingkan PDRB rata-rata nasional, namun setiap tahunnya PDRB kabupaten Fakfak mengalami peningkatan dan pertumbuhan.

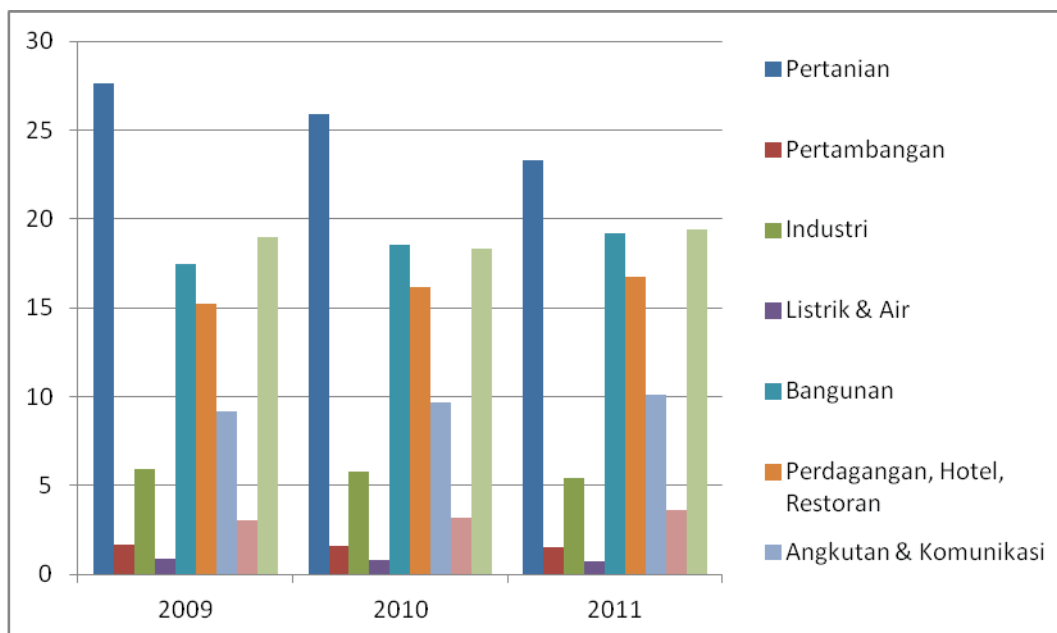
3.4.3. Struktur Perekonomian Kabupaten Fakfak

Struktur ekonomi Kabupaten Fakfak masih didominasi oleh sektor Pertanian, meskipun selama 3 tahun terakhir kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan tetapi kontribusinya pada periode 2009-2011 masih di atas sektor yang lainnya. Artinya ekonomi Kabupaten Fakfak masih bergantung pada sektor pertanian yang jumlahnya di atas 20 persen. Penurunan sumbangan sektor pertanian dipengaruhi oleh tumbuhnya sektor bangunan dan sektor jasa yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Sektor jasa merupakan penyumbang kedua bagi perekonomian Kabupaten Fakfak, meskipun persentase sumbangan sektor jasa dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif tetapi kecenderungannya semakin meningkat. Tahun 2011 sektor jasa sumbangnya 19,39 persen naik dibandingkan tahun 2010 yang sumbangannya 18,31 persen. Gambar 1 menunjukkan struktur perekonomian Kabupaten Fakfak tahun 2009-2011.



Gambar 1. Struktur Ekonomi Kabupaten Fakfak Tahun 2009-2011



Peranan masing-masing sektor perekonomian di Kabupaten Fakfak terhadap pembentukan PDRB disajikan melalui Tabel 10.

Tabel 10. Peranan Sektorial Perekonomian Kabupaten Fakfak terhadap Pembentukan PDRB Tahun 2009-2011

No	PDRB	2009	2010	2011
1	Pertanian	27,60	25,89	23,17
2	Pertambangan dan Penggalian	1,68	1,64	1,57
3	Industri Pengolahan	5,90	5,76	5,44
4	Listrik dan Air bersih	0,91	0,83	0,73
5	Bangunan	17,49	18,55	19,23
6	Perdagangan Hotel dan Restoran	15,23	16,14	16,77
7	Angkutan dan komunikasi	9,20	9,69	10,11
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	3,03	3,19	3,59
9	Jasa-jasa	18,95	18,31	19,39
P D R B		100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Fakfak dalam Angka tahun 2012, BPS



Sektor dengan kontribusi urutan ketiga adalah sektor bangunan, tahun 2009 sumbangan sektor bangunan masih 17,49 persen dan mengalami peningkatan secara bertahap sehingga tahun 2011 sumbangan sektor bangunan terhadap ekonomi Kabupaten Fakfak mencapai 19,23 persen. Peningkatan sumbangan sektor bangunan banyak dipengaruhi oleh peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Fakfak.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menempati urutan ke-4 sumbangannya untuk ekonomi Kabupaten Fakfak, dalam tiga tahun sumbangannya meningkat dari 15,23 persen di tahun 2009 terus meningkat mencapai 16,77 persen di tahun 2011. Sektor Angkutan dan Komunikasi menempati urutan kelima sumbangannya untuk ekonomi Kabupaten Fakfak, dalam tiga tahun sumbangannya meningkat dari 9,20 persen di tahun 2009 terus meningkat mencapai 10,11 persen di tahun 2011. Sementara itu empat sektor lainnya (industri pengolahan, listrik dan air bersih, Pertambangan dan Penggalian, keuangan dan persewaan) di tahun 2011 kontribusinya terhadap ekonomi Kabupaten Fakfak di bawah 6%.

3.4.4. Sistem Pemerintahan Kabupaten Fakfak

Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak memiliki 9 distrik dengan 5 kelurahan serta 118 kampung. Dilihat dari komposisi jumlah kampung/kelurahan, Distrik Kokas yang memiliki jumlah kampung/kelurahan terbanyak yaitu 21 kampung dan 1 kelurahan. Sedangkan Distrik Karas memiliki jumlah kampung/kelurahan paling sedikit yaitu 7 kampung.

Kecamatan/Distrik adalah satuan wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan wilayah kerja perangkat pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum, yang langsung di bawah Bupati/Walikota dan membawahi beberapa Desa/Kampung/ Kelurahan. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. **Kelurahan** adalah suatu wilayah lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan (UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).



Desa/Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa/Kampung di bedakan menjadi tiga Jenis yaitu:

a. **Kampung Swadaya**

Adalah Desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri daerahnya terisolir dengan daerah lainya, penduduknya jarang, mata pencaharian bersifat homogen, masyarakat memegang teguh adat, sarana dan prasarana sangat kurang.

b. **Kampung Swakarya**

Adalah peralihan atau transisi dari Desa Swadaya menuju Desa Swasembada.

c. **Kampung Swasembada**

Adalah Desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.

3.5. Pengelolaan dana Otsus di Kabupaten Manokwari dan Fakfak

Ada empat program prioritas yang ditetapkan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur. Keempat bidang itu menjadi program utama karena keempat hal itulah yang dianggap menjadi penyebab ketertinggalan pembangunan di Papua. Otonomi khusus sudah dilaksanakan selama 11 tahun enam bulan: 1 Januari 2002-Juni 2012. Selama ini, sektor pendidikan dan kesehatan mendapat perhatian secara khusus karena sumberdaya manusia Papua secara kuantitas dan kualitas masih sangat jauh tertinggal dibanding provinsi lain di Indonesia.



Pengelolaan dana Otsus pada tahun pertama: 2002 dan tahun kedua: 2003, pemerintah Provinsi mengelola 60 persen dan kabupaten/kota mengelola 40 persen. Tapi sejak tahun ketiga: 2004, dana Otsus sebesar 60 persen dikelola kabupaten dan Provinsi mengelola 40 persen. Dana 60 persen tersebut kemudian didistribusi ke distrik dan kampung dalam berbagai program pemberdayaan dan program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian beberapa program dari tingkat provinsi dapat dilakukan juga di distrik-distrik tertentu.

Efektivitas Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Papua *)

Sejak tahun 2001, Papua disahkan menjadi provinsi dengan Otonomi Khusus (Otsus), melalui Undang Undang No 21 Tahun 2001. Atas dasar itulah, Provinsi Papua berhak mengelola dana Otsus, yang kemudian digunakan untuk pengembangan empat program utama, yaitu: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur. Pelaksana semua program tersebut adalah dinas-dinas yang berada di Provinsi Papua.

Setelah Provinsi Papua mekar menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat, kedua provinsi ini tetap berhak untuk mengelola dana otsus, tidak terkecuali Kabupaten Manokwari dan Fakfak yang merupakan bagian dari Provinsi Papua barat. Berbagai program telah digelontorkan oleh dinas-dinas terkait, yang umumnya mengarah pada peningkatan kapasitas pengusaha mikro dan kecil, permodalan, infrastruktur usaha dan lain sebagainya, melalui berbagai jenis program sesuai dengan kapasitas dan mandat dinas masing-masing.

Efektivitas penggunaan dana Otsus untuk peningkatan ekonomi masyarakat tentu tidak hanya dipengaruhi oleh pilihan dari program-program yang telah berjalan, tetapi juga ditentukan dari sinergisitas antara program dari setiap *stakeholder*. Dalam regulasi perencanaan dan pelaksanaan dana Otsus, ada aturan yang termaktub dalam UU 21 atau pun Perdasus 18 tahun 2008, dimana salah satu hal yang harus



dilaksanakan untuk meningkatkan kerjasama dan efektivitas penggunaan dana Otsus akan dapat tercapai jika semua stakeholder mensinergikan program-program lintas sektoral melalui koordinasi yang baik, sehingga menjadi lebih efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dari hasil lokakarya lintas sektoral yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari dan Fakfak, secara umum setuju bahwa penggunaan dana otsus untuk peningkatan ekonomi masyarakat belum efektif penggunaannya, karena program-program yang dijalankan oleh dinas terkesan hanya bagi-bagi uang kepada masyarakat yang dikemas dalam berbagai program. Masyarakat pun menganggap sebagai dana pemberian dari pemerintah yang tidak perlu di pertanggungjawabkan ataupun dikembalikan, sehingga walaupun pelaksanaan otsus sudah hampir 11 tahun keberhasilan pelaksanaannya untuk meningkatkan ekonomi rakyat, belum dapat dinyatakan secara resmi keberhasilannya. Padahal, sesungguhnya Otsus tersebut telah berjalan sangat lama.

Situasi lain yang juga berkontribusi pada tidak efektifnya penggunaan dana otsus adalah dalam perencanaan program, setiap dinas mengumpulkan data sendiri-sendiri, menganalisis dan kemudian menyusun program sendiri-sendiri. Mereka kurang sinergi dengan dinas lainnya walaupun tujuan programnya hampir sama. Situasi itu mencerminkan begitu royalnya pemerintah dalam menggunakan uang yang dititipkan kepada mereka. Semua itu bukan rahasia lagi dan telah menjadi keluhan beberapa dinas dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat.

Muara dari apa yang telah dilaksanakan pemerintah selama ini, pada umumnya tidak ada kesepahaman dalam perencanaan program, sehingga banyak uang yang telah digunakan tiada bermanfaat. Tumpang tindih berbagai program yang tidak selaras tidak kunjung diperbaiki, akibatnya potensial membangun perilaku tidak bertanggungjawab masyarakat. Sebagai contoh adalah terbangunnya preseden buruk bahwa dana Otsus adalah hak mereka, dan ketika ada program mikro kredit yang berasal dari dana Otsus, mereka menganggap merasa tidak perlu dikembalikan.



Padahal peserta lokakarya yang juga sebagian merupakan masyarakat penerima dana otsus, menginginkan perubahan pola penyaluran dana otsus yang berupa hibah ataupun bantuan dari dinas dengan berbagai macam program menjadi dana pinjaman lunak yang disalurkan melalui LKM sebagai dana bergulir. Harapannya dengan perubahan pola tersebut dapat mendidik masyarakat penerima dana otsus agar memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut sesuai aturan yang berlaku di LKM yang menyalurkan dana tersebut. Disamping untuk menghemat penggunaan dana otsus karena dana tersebut tidak habis begitu saja akan tetapi sifatnya bergulir, harapan lain dengan perubahan pola ini diharapkan penggunaan dana otsus menjadi lebih efektif.

Walaupun belum ada evaluasi resmi, namun setidaknya ada empat tolok ukur untuk melihat apakah dana Otsus tersebut telah mampu meningkatkan ekonomi rakyat, yaitu : 1) turunnya tingkat kemiskinan, 2) naiknya tingkat pendapatan perkapita, 3) naiknya konsumsi perkapita dan 4) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Papua.

Peserta lokakarya mendukung bahwa pola penyaluran dana otsus perencanaan harus segera dirubah agar tercapai tujuan jangka panjang yang bernilai ekonomis. Untuk mencapai maksud tersebut ada beberapa usulan yang perlu segera dilakukan antara lain :

- Mengevaluasi kembali regulasi yang sudah digelontorkan pemerintah terkait dengan penggunaan dana Otsus,
- Merubah metode perencanaan kegiatan, sehingga tidak hanya melibatkan eksekutif, tetapi perlu bersifat partisipatif untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan cara melibatkan pihak-pihak lain atau stakeholder lain, seperti : pengusaha, masyarakat, LSM, dll, baik di tingkat kampung, kecamatan dan lain-lain.



- Perlu diwujudkan sinergisitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat menghemat dan mendayagunakan dana rakyat yang telah dititipkan kepada pemerintah.
- *) Diringkas ulang dari hasil Lokakarya Lintas Sektoral, Pemetaan LKM dan Situasi Terkini Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.*



IV. SITUASI DAN KONDISI TERKINI PENGEMBANGAN DAN AKSES PERMODALAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI MANOKWARI DAN FAKFAK

3.1. Kabupaten Manokwari

3.1.1. Pengembangan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Manokwari

Dasar pengelompokkan skala usaha adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengelompokkan didasarkan pada kekayaan bersih dan omset penjualan tahunan. Sebagian besar usaha Indonesia pada umumnya merupakan usaha dengan skala mikro dan kecil dengan omset penjualan tahunan maksimum 2,5 milyar rupiah. Untuk Kabupaten Manokwari sendiri didominasi oleh usaha mikro. Hasil survei Lembaga Penelitian UNIPA dan Bank Indonesia Tahun 2012 terhadap 80 pelaku usaha di Manokwari menunjukkan bahwa sebanyak 62,5% merupakan usaha mikro dan sisanya sebanyak 37,5% termasuk dalam kategori usaha kecil. Dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil dikelola oleh pengusaha asli Papua.

Untuk pengelompokkan sektor usaha mengacu pada pengelompokkan Badan Pusat Statistik (BPS). Sektor usaha yang dikelola oleh masyarakat manokwari khususnya masyarakat asli Papua umumnya bergerak dalam sektor pertanian dalam arti luas dan Industri pengolahan termasuk di dalamnya kerajinan. Distribusi sektor usaha yang dikembangkan bergantung pada wilayah dimana masyarakat tersebut berada. Masyarakat di dataran rendah (pantai) seperti Manokwari Barat dan Manokwari Utara, sektor usaha yang dikelola oleh UMK antara lain petani, peternakan, nelayan, penjual sayuran, kerajinan tangan, pengolahan kayu, dan sebagian kecil bergerak pada sektor perdagangan (kios) terutama di daerah Manokwari Utara. Lain halnya dengan masyarakat yang berada di daerah dataran tinggi seperti



Distrik Minyambouw, masyarakat umumnya mengusahakan sayuran dataran tinggi sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain berperan hanya sebagai petani sayuran dataran tinggi, sebagian juga berperan sebagai penjual sayur langsung ke kota Manokwari.

Pelaku UMK terutama masyarakat asli Papua umumnya terbatas dalam berbagai aspek seperti finansial, keterampilan, manajemen usaha, hingga pemasaran. Dengan keterbatasan tersebut, sangat sulit diharapkan pelaku usaha tersebut dapat bersaing dan berkembang semakin baik jika tidak diberi ruang dan intervensi yang memadai dari pihak pemerintah maupun swasta. Karena itu kunci dari pengembangan UMK pengusaha asli Papua di Manokwari adalah pemberdayaan pelaku usaha dalam berbagai aspek.

Pengembangan usaha mikro kecil (UMK) di Manokwari merupakan salah satu tugas pokok dari beberapa instansi teknis (SKPD) di Kabupaten Manokwari seperti Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan instansi lain yang terkait. Proses pengembangan UMK tersebut dilakukan dengan berbagai cara antara lain pelatihan keterampilan pelaku UMK dalam mengelola usaha atau keterampilan teknis tertentu, bantuan pembinaan, hingga bantuan dalam bentuk dana bergulir atau dengan bantuan langsung dengan bunga yang rendah. Pada prinsipnya tujuan dari pengembangan UMK tersebut adalah untuk mendorong UMK untuk semakin berdaya dan pada akhirnya dapat mandiri.

Untuk mendorong pengembangan usaha mikro kecil di Manokwari, Pemerintah Daerah setempat melalui dinas teknis terkait melakukan berbagai program kerja. Adapun instansi teknis terkait yang berperan dalam pengembangan UMK di Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Manokwari

Salah satu tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Manokwari adalah mendorong atau memfasilitasi bertumbuhnya industri-



industri/usaha dan koperasi dan melakukan pembinaan secara terus-menerus untuk menjamin keberlangsungan usaha, khususnya usaha skala mikro kecil dan koperasi. Pembinaan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten manokwari berbentuk bantuan pendanaan, peningkatan keterampilan melalui pelatihan, pendampingan fasilitasi, dan bantuan lainnya.

Berdasarkan data dari Dinas perindustrian dan Perindustrian Provinsi Papua Barat dan melalui hasil verifikasi lapangan Tim Peneliti Survei UMKM UNIPA tahun 2012 diperoleh informasi jumlah UMKM di Kota Manokwari sebanyak 273 UMKM. Sebagian besar usaha adalah usaha skala mikro kecil. UMKM tersebut umumnya bergerak dalam sektor industri pengolahan dan Perdagangan. Sedangkan Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang aktif di Manokwari hingga Tahun 2012 adalah berjumlah 10 unit koperasi. Profil KSP aktif yang terdapat di Manokwari disajikan melalui Tabel 1.

Tabel 11. Profil Koperasi Simpan Pinjam yang Terdapat di Manokwari

No	Nama Koperasi	Alamat	Berdiri Tahun	Jumlah Anggota	Aset (Rp-Juta)	Pinjaman (Rp-Juta)	Simpanan (Rp-Juta)
1	CU Mambuin	Jl. Transito	2006	3411	34.542,416	23.913,042	23.500,082
2.	Koperasi Sinjai putera	Jl. AMD Wosi	2009	327	500	450	60
3	Koperasi Sumber Rejeki	Jl. AMD Wosi	2005	27	300	159,9	n.a
4	Koperasi Arfak Jaya	Jl. Percetakan Negara	2003	250	700	400	300
5	Koperasi Mitra Usaha	Jl. AMD Wosi	2004	300	694,72	na	n.a
6	Koperasi Limbong	Jl. Fanindi	2009	162	450	130	40
7	Koperasi Eklesia	Jl. Trikora	2010	350	600	300	n.a
8	Koperasi Cenderawasih	Jl. Trikora Wosi	2011	211	1.500	1.300	n.a
9	Koperasi Walet	Jl. Brawijaya	2010	183	600	254	n.a
10	Koperasi Empat	Jl. Pertanian	2011	120	n.a	200	n.a



2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Manokwari

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Manokwari juga merupakan salah satu instansi teknis yang bertugas melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha mikro kecil masyarakat yang bergerak dalam sektor pertanian. Salah satu program pembinaan Dinas Pertanian yang telah dilakukan di Kabupaten Manokwari adalah pembinaan kelompok tani. Kelompok tani merupakan wadah bagi petani untuk mengembangkan usaha. Selain kegiatan produksi usaha tani, salah satu kegiatan yang juga dilakukan dalam kelompok tani adalah usaha simpan-pinjam. Kegiatan ini berupa pemberian pinjaman modal kerja berbentuk barang kebutuhan pertanian seperti benih, pupuk, dan obat-obat pemberantas hama.

Kelompok tani di Manokwari juga bergerak dalam sektor peternakan, khususnya ternak sapi yang dilakukan dengan membentuk kelompok dengan beberapa persyaratan yang mengikat anggota kelompok. Pengelompokan usahatani di Manokwari dimaksudkan untuk menyatukan kemampuan untuk menyediakan peralatan produksi usaha tani yang tidak dapat disiapkan secara perseorangan seperti traktor, alat pengering, dan sebagainya.

Secara nasional telah dikembangkan program yang dikembangkan program pengembangan kelompok tani yaitu Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Program ini dilakukan di pedesaan karena tingkat kemiskinan terbesar berada di daerah pedesaan dan harus ditanggulangi secara sistematis dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia di pedesaan bekerja dalam sektor pertanian dalam arti luas, maka program ini kemudian diarahkan untuk masyarakat petani yang diorganisir dalam bentuk kelompok tani. Melalui program ini diharapkan dapat mengubah paradigma berusaha sebagian besar masyarakat petani kita yang umumnya hanya



untuk memenuhi kebutuhan pokok, menjadi paradigma agribisnis sehingga produk usaha tani dapat dipasarkan secara lebih baik.

PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, GAPOKTAN didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani. Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja dipedesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Kementerian Pertanian maupun Kementerian/Lembaga lain di bawah payung program PNPM Mandiri.

Tujuan dari program PUAP ini untuk:

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah;
- b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani;
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Sasaran PUAP yaitu sebagai berikut:

- a. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin/tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa;



- b. Berkembangnya 10.000 GAPOKTAN/POKTAN yang dimiliki dan dikelola oleh petani;
- c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
- d. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Pelaksanaan PUAP di Kabupaten Manokwari dimulai sejak Tahun 2008. Hingga tahun 2012 telah menjangkau 106 GAPOKTAN, dimana setiap GAPOKTAN terdiri atas 2-3 Kelompok Tani. Fokus pelaksanaan program PUAP di Kabupaten Manokwari ditujukan untuk memberdayakan kelompok tani dari masyarakat asli Papua. Kelompok tani yang mendapatkan bantuan sekitar 90% berasal dari masyarakat asli Papua, yang bergerak dalam sektor usaha mikro bidang pertanian. Bantuan yang disalurkan ke GAPOKTAN melalui kegiatan PUAP adalah sebesar Rp 100 juta/Gapoktan. Di Kabupaten Manokwari sendiri terdapat 550 Kelompok Tani yang tersebar di 17 Distrik. Di Distrik Minyambouw terdapat 4 Kelompok Tani, sedangkan di Manokwari Utara terdapat 3 Kelompok Tani. Perkembangan pelaksanaan PUAP di Kabupaten Manokwari disajikan melalui Tabel 12 .

Tabel 12. Perkembangan pelaksanaan Program PUAP di Kabupaten Manokwari

Tahun	Jumlah Gapoktan	Jumlah Bantuan
2008	38	Rp 3,8 Milyar
2009	17	Rp 1,7 Milyar
2010	18	Rp 1,8 Milyar
2011	14	Rp 1,4 Milyar
2012	19	Rp 1,9 Milyar

Sumber : Kantor Penyuluh Pertanian Kabupaten Manokwari, 2012.



3.1.2. Akses ke keuangan/permodalan untuk peningkatan usaha mikro dan kecil bagi masyarakat asli Papua di Manokwari

Kesadaran akan perlunya kredit perbankan untuk pengembangan usaha di Papua Barat dan Manokwari khususnya cukup tinggi. Hal tersebut ditandai dengan besarnya posisi kredit perbankan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010 posisi kredit perbankan di Kabupaten Manokwari mencapai 762,39 milyar rupiah. Dari total kredit tersebut, sebanyak 58,83% merupakan kredit untuk usaha UMKM atau sebesar 466,16 milyar rupiah. Namun demikian kondisi akses keuangan pelaku usaha mikro dan kecil masyarakat khususnya masyarakat asli Papua di Lembaga Keuangan Mikro Bank masih relatif rendah, terutama untuk masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Tabel 13 menunjukkan kondisi akses kredit mikro di beberapa LKM bank di manokwari.

Tabel 13. Realisasi Kredit Mikro LKM Bank di Manokwari tahun 2012

LKM Bank	Kredit Mikro (Rp)			Debitur (orang)		
	Total Kredit	Papua	Non Papua	Papua	Non-Papua	Total
Bank Papua	1.440.438.580	366.314.935		62	63	125
			1.074.123.645			
BRI	178.593.730.000	n.a	n.a	n.a	n.a	6.325

Tabel 13 menunjukkan bahwa hingga tahun 2012, jumlah kredit mikro yang telah disalurkan di Manokwari cukup besar. Namun demikian, data dari Bank Papua menunjukkan bahwa akses pengusaha mikro Papua masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan non-Papua sekalipun jumlah debitur relatif sama. Dari total kredit mikro Rp 1.440.438.580 yang disalurkan hanya sebesar 25,43% atau sebesar Rp 366.314.935, sedangkan sisanya (74,57%) diakses oleh pengusaha non Papua. Rata-rata peminjaman pengusaha mikro asli Papua hanya sebesar Rp 5.908.305. Angka ini jauh di bawah rata-rata kredit pengusaha mikro non-Papua yaitu sebesar Rp 17.049.582. Rata-rata kredit



mikro yang disalurkan oleh LKM BRI Cabang Manokwari hingga tahun 2012, menunjukkan jumlah yang lebih besar yaitu sebesar Rp 28.842.390, dengan jumlah total kredit sebesar Rp 178.593.730.000 dengan debitur sebesar 6325 orang. Namun demikian tidak ada jumlah pasti mengenai jumlah debitur Papua dan non-Papua, namun demikian informasi agregat diperoleh bahwa sebagian besar debitur tersebut berasal dari pengusaha mikro non-Papua.

LKM bank lain di Manokwari adalah BPR Arfindo, yang hingga Agustus Tahun 2012 telah menyalurkan kredit sebesar Rp 103.344.345.000 kepada 4.160 debitur di Manokwari dan Sorong dengan komposisi kredit mikro sebesar Rp.21.293.379.000 (21%), kredit kecil sebesar Rp 48.691.376.000 (47%) dan kredit menengah sebesar Rp.15.096.462.000 (32%). Khusus kredit mikro dipergunakan untuk modal kerja 56%, investasi 13% dan konsumsi 31%. Dari total kredit tersebut, sekitar 20% dari nasabah kredit mikro (produktif) adalah asli Papua. Sedangkan untuk kredit mikro (konsumsi) sebagian besar atau 80% nasabahnya asli Papua. Dengan kata lain BPR Arfindo dalam pemberian kredit untuk usaha produktif mayoritas nasabahnya adalah non asli Papua.

Berbagai faktor yang menjadi penyebab rendahnya akses keuangan masyarakat khususnya masyarakat asli Papua terhadap LKM bank, antara lain :

- a. Kurangnya informasi mengenai skim kredit yang ditawarkan di LKM bank.
- b. Ketidakmampuan memenuhi persyaratan legal formal perbankan, misalnya masalah jaminan.
- c. Kemampuan pengembalian pinjaman rendah akibat rendahnya kemampuan mengelola usaha
- d. Ketidakberanian pengusaha asli Papua untuk mengambil resiko utang untuk investasi
- e. Perilaku hidup yang lebih konsumtif sehingga sering terjadi penyalahgunaan kredit karena pengelolaan keuangan yang belum memadai termasuk belum dapat



memisahkan antara keuangan untuk usaha dan keuangan untuk keperluan keluarga.

- f. Akses ke pasar produk yang dihasilkan masih sangat rendah, sehingga tidak memadai untuk membayar pengembalian kredit.

Adanya kesulitan masyarakat untuk memenuhi persyaratan formal LKM Bank, dapat teratasi dengan kehadiran Credit Union (CU) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang memberikan pinjaman mikro dengan persyaratan dan proses yang jauh lebih mudah. LKM non bank dan koperasi-koperasi tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro karena memberikan kemudahan dalam hal proses dan jumlah pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (mulai dari 500 ribu rupiah). Walaupun demikian tingkat bunga yang dikenakan untuk peminjaman melalui KSP jauh lebih tinggi dari bunga LKM bank. Hingga Tahun 2012, CU dan KSP di Manokwari telah menyalurkan kredit mikro sebesar sekitar 27 miliar rupiah, dengan jumlah nasabah/anggota sebanyak 5341 orang. Ketersediaan pelaku usaha mikro mengakses kredit melalui KSP atau CU sekalipun mendapatkan bunga yang jauh lebih tinggi sebenarnya lebih karena pilihan yang terbatas akibat ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan dan proses yang diterapkan di LKM bank, misalnya jaminan. Dengan bunga yang relatif tinggi, dapat dipastikan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro jauh berkurang.

Oleh karena ini itu, pemerintah perlu melakukan intervensi dengan kewenangan yang dimiliki untuk menjembatani (intermediasi) antara pelaku usaha mikro asli Papua dengan LKM bank untuk dapat mengakses kredit yang lebih mudah dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Pemerintah dapat berperan sebagai penjamin pinjaman masyarakat atau melakukan subsidi bunga pinjaman. Selain pihak lain perlu dilibatkan seperti Perguruan Tinggi atau LSM untuk membantu dalam proses pendampingan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro sehingga mampu mengakses kredit perbankan dan mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.



3.1.3. Model pengembangan UMK dan Pemberdayaan LKM di Kabupaten Manokwari

Untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMK untuk masyarakat asli Papua di Kabupaten Manokwari, perlu adanya sinergi antara berbagai stakeholder yang berkepentingan. Stakeholder yang perlu dilibatkan adalah upaya pemberdayaan ini antara lain pemerintah daerah (Bappeda, dinas teknis terkait), LKM (Bank dan Non Bank), Perguruan Tinggi, LSM/NGO, Lembaga Donor, dan Pelaku UMK itu sendiri. Masing-masing stakeholder mempunyai tugas yang berbeda yang semuanya bermuara pada pemberdayaan pengusaha mikro Papua.

Hasil rumusan lokakarya dengan semua *stakeholder* yang terlibat dalam upaya pemberdayaan pengusaha asli Papua dan pemberdayaan LKM di Kabupaten Manokwari merekomendasikan adanya sebuah Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Mikro (LPKM) bagi pelaku usaha mikro masyarakat asli Papua yang melibatkan pemerintah, LKM, Perguruan Tinggi dan LSM/NGO. Di dalam lembaga ini diharapkan adanya Inkubator Bisnis yang berperan dalam proses pemberdayaan pelaku usaha mikro sebelum mendapatkan akses ke LKM yang telah bekerjasama dengan pemerintah. Inkubator bisnis berfungsi dalam pembentukan kelompok usaha, pembimbingan dan pelatihan anggota, pendampingan, evaluasi kelompok usaha hingga dapat mengakses kredit ke LKM serta mendampingi dalam proses pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMK.

Pemahaman tentang inkubasi dan inkubator menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002:

1. Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi.



2. Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausahawan yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan metode inkubasinya, maka inkubator bisnis dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu : *in wall* dan *out wall*. *In wall* adalah bentuk inkubator bisnis dimana usaha kecil yang akan dierami tersebut tinggal bersama perusahaan yang mengeraminya, sehingga dapat belajar dan berkembang bersama. Sedangkan untuk *out wall*, inkubator dan bisnis yang diinkubasi tidak tinggal serumah, tetapi terpisah. Sehingga eraman yang diberikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan penguatan, sehingga tidak sehangat yang dilakukan oleh *in wall*.

Pada umumnya, bantuan yang diberikan inkubator bisnis dalam proses mengerami tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan terkait dengan peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan, baik melalui pelatihan dan bimbingan konsultasi.
- b. Membantu strategi dan membuka jaringan pemasaran serta kerjasama dengan pihak lain.
- c. Membantu dalam pengelolaan keuangan dan pembukuan usaha.
- d. Membantu membukakan akses kepermodalan atau memberikan bantuan modal.
- e. Membantu mendesain dan mengembangkan budaya perusahaan, seperti *brand* dan etika bisnis.
- f. Membantu memberikan pengetahuan terkait dengan regulasi yang berjalan.



Berdasarkan bantuan tersebut, hal-hal yang kemudian akan dilakukan oleh inkubator bisnis adalah suatu bagian dari program kemitraan, untuk mengembangkan bisnis bersama-sama, dengan tujuan agar usaha tersebut menjadi suatu bisnis yang nyata dan berkembang sesuai dengan visi dari perusahaan. Terkait dengan model inkubator bisnis yang *in wall*, harus memiliki persyaratan sebagai berikut, yaitu:

1. Dapat menyediakan tempat untuk pengembangan usaha pada tahap awal.
2. Dapat menyediakan fasilitas kantor yang bisa digunakan secara bersama.
3. Dapat memberikan layanan, termasuk konsultasi manajemen dan pemasaran, hukum serta informasi perdagangan dan teknologi.
4. Dapat membantu akses kepada riset, pembentukan jaringan profesional, jaringan internasional, penggunaan teknologi serta investasi.
5. Dapat meningkatkan kapasitas pengusaha yang di inkubasi melalui latihan penyiapan rencana bisnis, manajemen, dan kemampuan lainnya.
6. Dapat memberikan dana bergulir internal atau dengan membantu akses usaha kecil pada sumber-sumber pendanaan atau lembaga keuangan yang ada.
7. Mampu membantu sinergisitas, kerjasama, membangun jejaring (*network*) dengan pihak universitas, lembaga riset, usaha swasta, profesional maupun dengan masyarakat internasional.

Untuk Kabupaten Manokwari ada 2 lembaga yang potensial dapat berperan sebagai inkubator bisnis yang dinilai berdasarkan pengalaman dan kompetensi yang dimilikinya, yaitu Lembaga Penelitian UNIPA dan Yayasan Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumber Daya Alam (PERDU). Gambaran umum mengenai potensi kedua lembaga tersebut tersaji melalui Tabel 14.

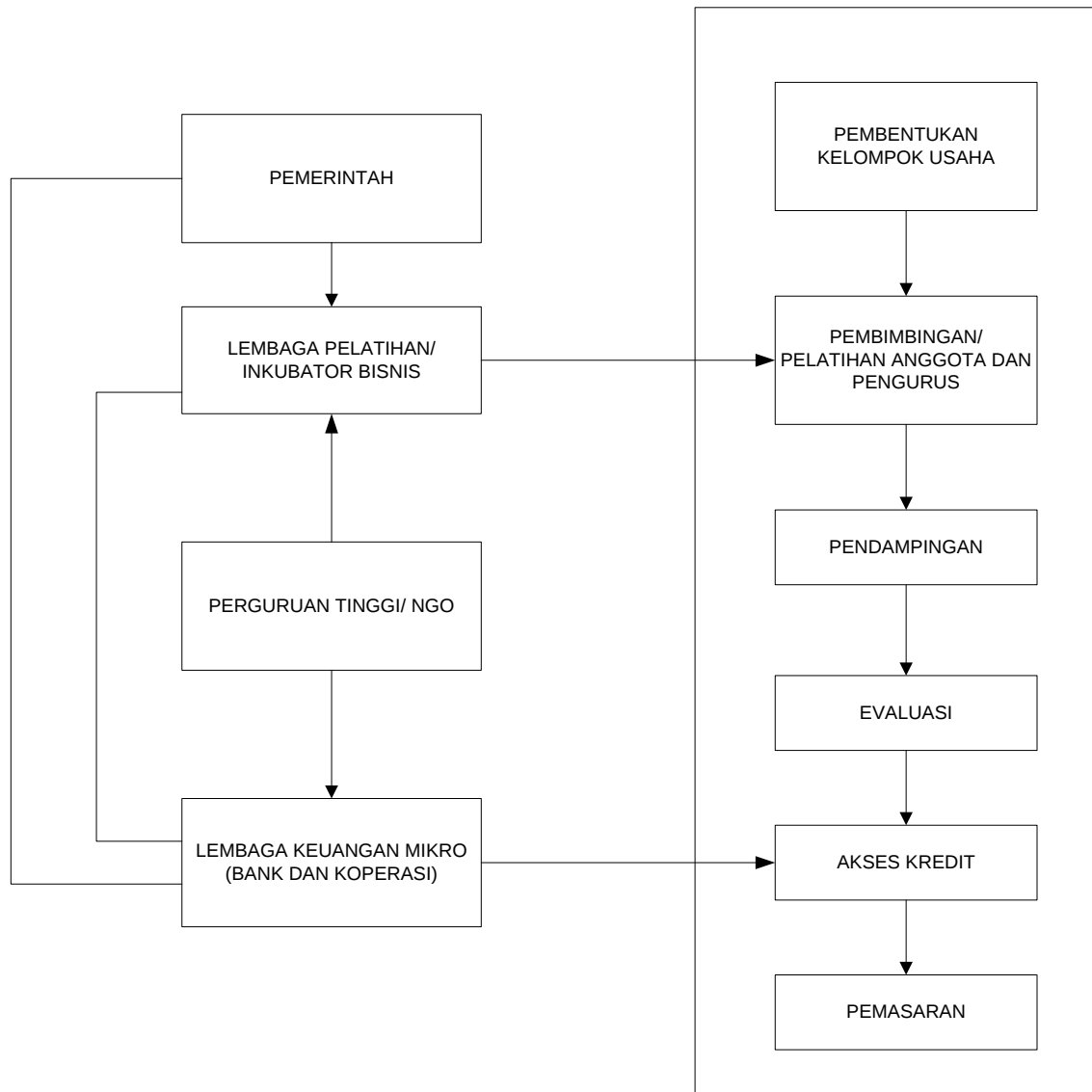


Tabel 14. Lembaga yang potensial sebagai inkubator bisnis di Kabupaten Manokwari

No	Nama Lembaga	Kelebihan	Kekurangan
1	Lembaga Penelitian UNIPA	- Memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dari berbagai disiplin ilmu - Memiliki fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memadai. - Memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang-bidang tertentu - Memiliki pusat-pusat studi yang dapat menopang kegiatan penelitian - Memiliki jaringan yang luas dalam maupun luar Papua, bahkan hingga ke luar negeri	- Tidak memiliki unit khusus yang berperan dalam proses pendidikan dan pelatihan masyarakat. - Tidak fokus dalam melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan karena berbagai tugas lainnya.
2	Yayasan Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumber Daya Alam (PERDU) PERDU	- Memiliki sumberdaya manusia (staf) yang terdidik (alumni perguruan tinggi). - Mempunyai pengalaman yang memadai dalam proses pengkajian, pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat - Fokus dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. - Memiliki jaringan yang luas dengan LSM yang lain di Papua dan di Indonesia	- Tidak memiliki sumberdaya manusia yang berasal dari berbagai bidang ilmu. - Fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dimiliki kurang memadai.



Skema hubungan antara Pemerintah dan stakeholder lainnya disajikan melalui skema pada Gambar 2.



Gambar 2. Skema hubungan fungsional antara Stakeholder dalam Lembaga Pengembangan Keuangan Mikro hasil lokakarya di Kabupaten Manokwari

Dengan adanya lembaga tersebut diharapkan program pemberdayaan usaha mikro melalui pemberian bantuan kredit perbankan akan berlangsung lebih baik. Pelaku usaha mikro tidak hanya diberi bantuan kredit melalui LKM tetapi juga diberdayakan dan didampingi sehingga mampu melakukan pengembalian pinjaman



mikro yang diperoleh. Bantuan pinjaman kredit mikro pemerintah ini akan berhenti ketika pelaku usaha tersebut telah dapat meningkatkan skala usaha menjadi skala menengah yang dianggap telah mandiri secara finansial dalam pengelolaan usaha.

3.2. Kabupaten Fakfak

3.2.1. Pengembangan Usaha mikro dan kecil di Kabupaten Fakfak

Di Indonesia, usaha mikro dan usaha kecil telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian nasional. Sebagai gambaran, pada tahun 2000 tenaga kerja yang diserap industri rumah tangga (salah satu bagian dari usaha mikro sektor perindustrian) dan industri kecil mencapai 65,38% dari tenaga kerja yang diserap sektor perindustrian nasional. Pada tahun yang sama sumbangan usaha kecil terhadap total PDB mencapai 39,93% (BPS, 2001).

Usaha mikro bersama usaha kecil juga mampu bertahan menghadapi goncangan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Indikatornya antara lain, serapan tenaga kerja antara kurun waktu sebelum krisis dan ketika krisis berlangsung tidak banyak berubah, dan pengaruh negatif krisis terhadap pertumbuhan jumlah usaha mikro dan kecil lebih rendah dibanding pengaruhnya pada usaha menengah dan besar. Lebih jauh lagi, usaha mikro dan usaha kecil telah berperan sebagai penyangga (*buffer*) dan katup pengaman (*safety valve*) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menyediakan alternatif lapangan pekerjaan bagi para pekerja sektor formal yang terkena dampak krisis.

Hasil penelitian UNIPA tahun 2010 pengusaha asli Papua di Fakfak menunjukkan bahwa sebanyak 95% pengusaha asli Papua bergerak dalam sektor usaha mikro kecil. Hanya 5% yang masuk kategori menengah, itupun bergerak dalam sektor tidak produktif seperti kontraktor. Hampir semua pelaku usaha mikro kecil masyarakat papua di Kabupaten Fakfak termasuk dalam kategori usaha informal. Usaha informal yang banyak dilakukan oleh pengusaha Papua di Kabupaten Fakfak adalah usaha



pertanian, perikanan/penangkapan ikan, pedagang sayur, pedagang pinang, pedagang bensin eceran dan ojek. Umumnya usaha tersebut berbentuk usaha perseorangan.

Kegiatan usaha mikro dan usaha kecil tidak lepas dari peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengembangannya. Pemerintah sebagai pelaku keuangan mikro yang melayani masyarakat miskin baik di perkotaan maupun pedesaan telah dipraktikkan di Kabupaten Fakfak. Berikut ini beberapa instansi yang memberikan kontribusi dalam pengembangan keuangan mikro di Kabupaten Fakfak.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyadari bahwa usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, ditandai dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Namun demikian sejumlah kajian di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha mikro berperan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Di samping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal.

Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak melalui BBappeda telah berupaya untuk mengembangkan penguatan usaha mikro dan kecil melalui beberapa program yang dibuat, antara lain :

1. Bekerjasama dengan LKM (BRI cabang Fakfak) untuk meningkatkan akses kredit bagi usaha mikro dan kecil di Wilayah Kabupaten Fakfak.

Usaha ini dilakukan dalam upaya meningkatkan akses kredit ke lembaga keuangan mikro (LKM) untuk UMK yang selama ini belum bisa mengakses kredit ke lembaga tersebut. Kerjasama ini dilakukan dengan memberikan subsidi bunga sehingga tingkat suku bunga yang dikenakan untuk kredit UMKM ini sangat



rendah, sehingga UMKM menjadi tidak terbebani dengan pengembalian bunga yang cukup besar.

Kerjasama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya untuk merubah pola bantuan atau hibah yang selama ini dilakukan Pemerintah Daerah ke Pola Bantuan Pembiayaan atau Kredit melalui Lembaga Keuangan Mikro. Pola pembiayaan atau kredit melalui Lembaga Keuangan Mikro dilakukan karena pola bantuan atau kredit bergulir yang selama ini yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah dalam penguatan usaha mikro kurang berhasil karena ada anggapan atau pemikiran dari para pelaku usaha atau masyarakat pada umumnya yang menganggap bahwa dana tersebut adalah dana pemerintah yang tidak perlu dikembalikan sehingga tingkat kemacetan sangat tinggi. Diharapkan dengan perubahan pola pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam hal ini melalui Bank BRI bisa merubah pola pikir pelaku usaha atau masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab dari pelaku usaha untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Dana pemerintah ditempatkan di BRI yang kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit pembiayaan dengan bunga rendah.

Kerjasama pola pembiayaan atau kredit melalui LKM cukup berhasil karena berdasarkan informasi dari LKM pelaksana Bank BRI tingkat pengembalian kredit dari UMKM cukup baik dengan nilai NPL sama dengan Nol. Bentuk kerjasama akan dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Peningkatan Akses kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Namun upaya kerjasama ini belum maksimal dalam arti belum banyak UMKM yang bisa mengakses kredit tersebut dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat atau pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro masyarakat asli papua yang ada di Kabupaten Fakfak. Ke depan untuk memperluas akses kredit bagi pelaku UMKM khususnya masyarakat asli papua, kerjasama ini



perlu diperluas tidak hanya dengan Bank BRI saja tetapi juga melibatkan LKM lain sehingga aksesnya menjadi lebih luas

2. Pengembangan Agropolitan dan Minapolitan

Selain melalui kerjasama penyaluran kredit untuk usaha mikro melalui LKM, pemerintah daerah melalui Bappeda juga melakukan upaya lain dalam pengembangan usaha mikro salah satunya melalui kegiatan Agropolitan di Distrik Bomberay dan Minapolitan di Distrik Kokas.

Pengembangan agropolitan yang dilakukan di Distrik Bomberay adalah melalui pengembangan usaha peternakan sapi dengan tujuan selain untuk pengembangan usaha peternakan sapi juga untuk pemenuhan kebutuhan akan daging sapi di Kabupaten Fakfak dan Provinsi Papua Barat. Pengembangan UMKM juga dilakukan di Distrik Kokas melalui penguatan usaha rumput laut dan perikanan melalui kegiatan minapolitan.

Namun sayang program ini kurang berhasil karena penyaluran dana melalui lembaga pemerintah sehingga ada pemikiran di masyarakat bahwa dana tersebut adalah dana pemerintah yang secara tidak langsung juga merupakan dana masyarakat atau dana mereka sehingga tidak ada keseriusan dan tanggung jawab dalam penggunaannya.

3. Pengembangan Usaha Pala dari Hulu hingga Hilir

Pala merupakan komoditas unggulan Kabupaten Fakfak, hampir semua masyarakat Fakfak terutama masyarakat asli Papua yang ada di Kabupaten Fakfak menjadikan Pala sebagai sumber pendapatan keluarga. Ada keinginan dari pemerintah daerah Kabupaten Fakfak melalui Bappeda untuk mengembangkan industri Pala menjadi komoditas unggulan dari hulu hingga hilir. Namun demikian, program ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Dari sekian banyak program yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui Bappeda, hal yang sama yang diperlukan untuk keberhasilan setiap program adalah



mesti adanya proses pendampingan yang harus dilakukan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Pendampingan tersebut mulai dari pendampingan manajemen usaha, manajemen keuangan, produksi hingga pemasaran.

2. Dinas Koperasi dan UMKM

Selain melalui Bappeda Pemerintah daerah juga melakukan penguatan usaha mikro melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Penguatan usaha mikro dan kecil melalui Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan dengan dibentuknya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi di setiap distrik untuk menyalurkan dana bantuan kepada pelaku usaha mikro. Namun pemahaman masyarakat yang menganggap dana pemerintah adalah dana masyarakat membuat program ini kurang berhasil dilaksanakan.

Jumlah koperasi yang telah dibentuk pada Tahun 2010 yang berjumlah sekitar 170 Koperasi yang berkembang di setiap kampung, pada akhir tahun 2011 hanya tinggal sekitar 40 koperasi yang masih aktif, dan itu pun terus berkurang jumlahnya hingga tahun 2012.

Hampir serupa dengan program-program pemerintah yang dilaksanakan oleh Bappeda, program pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM salah satu faktor lain yang menyebabkan kegagalan program tersebut adalah tidak adanya unsur pendampingan dalam pengelolaan koperasi. Pendampingan adalah hal yang sangat diperlukan untuk penguatan Lembaga Keuangan Mikro dalam hal ini koperasi untuk penyaluran dana kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di daerah.

3.2.2. Akses ke Keuangan/Permodalan untuk Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil Masyarakat Asli Papua di Fakfak

Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia, dengan mengatur lembaga keuangan menyediakan jasa pelayanan keuangan mikro di seluruh wilayah kepulauan tersebut.



Selain keberhasilan pada penyediaan keuangan mikro secara komersial, Indonesia juga merupakan tempat yang diminati untuk pengembangan program-program pemerintah bersubsidi, lembaga-lembaga keuangan lokal dan berbasis komunitas, koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Walaupun terdapat perkembangan yang cukup signifikan oleh penyedia jasa keuangan mikro, beberapa studi menunjukkan bahwa masih terdapat permintaan yang belum terpenuhi untuk pelayanan keuangan mikro, di mana mayoritas rumah tangga di pedalaman tetap belum memiliki akses pada sumber-sumber pendanaan dari lembaga setengah formal atau formal. Penyedia keuangan mikro yang teregulasi, seperti bank komersial dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus mengikuti prinsip-prinsip komersial dan lebih mengarah pada level atas pasar usaha mikro, yaitu di kabupaten atau kecamatan, dengan pinjaman lebih dari Rp 3 juta (USD300). Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat, koperasi dan Bank Kredit Desa (BKD) menjangkau level lebih rendah hingga terbawah, namun memiliki keterbatasan untuk menjangkau daerah pelosok. BRI Unit lebih mengarah meminjamkan untuk tujuan investasi sedangkan BPR berorientasi menyediakan pinjaman modal kerja. BRI unit merupakan pemain dominan di mana mereka diperkirakan menerima sekitar dua pertiga dari pengumpulan tabungan pada sektor keuangan mikro formal dan setengah formal; serta membukukan total 40% dari pinjaman (nilai) di usaha mikro. Sedangkan BPR memiliki pangsa pasar sekitar 15-20% dari sektor keuangan mikro.

Kondisi akses keuangan atau kredit bagi pelaku usaha mikro dan kecil khususnya pelaku usaha masyarakat asli Papua masih sangat minim padahal jumlah kredit yang disalurkan cukup besar sebagai contoh jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank BRI cabang Fakfak total jumlah kredit sekitar Rp. 202.000.000.000,- (**Dua Ratus Dua Milyar Rupiah**) untuk kredit usaha mikro yang memang merupakan core bisnis dari Bank Rakyat Indonesia. Begitu juga dengan LKM lain seperti Bank Papua mempunyai skim kredit khusus untuk usaha mikro seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).



Keberadaan skim kredit usaha mikro dan kecil di Lembaga Keuangan Mikro kondisinya saat ini di Kabupaten Fakfak, masih sedikit yang bisa diakses oleh pelaku usaha mikro dan kecil khususnya masyarakat asli papua dengan beberapa alasan antara lain : Kurang informasi dan sosialisasi skim kredit tersebut kepada pelaku usaha kecil dan mikro masyarakat asli papua, kemudian kecilnya akses kredit di LKM oleh pelaku usaha mikro dan kecil masyarakat asli papua adalah terkait ketatnya aturan yang harus diterapkan oleh LKM yang berbentuk bank dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro dan kecil, sehingga sulit untuk diakses oleh pelaku usaha mikro dan kecil khususnya masyarakat asli papua yang ada di Kabupaten Fakfak.

Bank Indonesia mendefinisikan usaha mikro yaitu usaha yang memiliki penghasilan tidak lebih dari 100 juta rupiah (USD10,000). Ini mungkin diperkirakan terlalu tinggi untuk sebuah negara yang memiliki PDB perkapita sekitar USD1,000. Pembiayaan bank kepada usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Fakfak meningkat signifikan setiap tahunnya, Pembiayaan ini jauh lebih besar dari total kredit yang disalurkan bank pada 2011 dengan total sebesar 177.778 juta rupiah. Nilai tersebut terdiri dari 91% untuk kebutuhan modal kerja, 9% untuk kebutuhan investasi. Kenyataannya elemen terbesar pada pembiayaan ini adalah untuk modal kerja kepada kelas menengah dan keluarga non miskin. Namun, tidak dipungkiri bahwa pembiayaan untuk kredit mikro melalui sistem perbankan sudah terus meningkat pada beberapa tahun terakhir.

Tabel 15. Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah yang diberikan Bank Umum di Kabupaten Fakfak

Tujuan Pinjaman	2011 (Juta Rupiah)	2012 (Juni) (Juta Rupiah)
Modal Kerja	162.278,-	164.623,-
Investasi	15.498,-	21.746,-
Tidak Teridentifikasi	0,-	0,-



Dari Jumlah kredit tersebut sektor perdagangan, hotel dan Restoran yang paling besar mendapat pembiayaan (115.496 juta rupiah) disusul sektor Jasa-Jasa (47.237 juta rupiah) di Tahun 2011.

Tabel 16. Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum di Kabupaten Fakfak Menurut Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	2011 (Juta Rupiah)	2012 (Juta Rupiah)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, perikanan	1.800	1.925
Pertambangan dan penggalian	57	702
Industri Pengolahan	4.895	5.766
Listrik, gas dan air	-	-
Konstruksi	1.325	1.029
Perdagangan, Hotel dan Restoran	115.496	115.772
Pengangkutan dan Komunikasi	4.575	5.097
Keuangan, Real estate	2.390	7.704
Jasa-jasa	47.237	48.374

Sumber : Bank Indonesia, 2012

Sektor perdagangan, hotel dan Restoran mendapatkan porsi pembiayaan yang paling besar (kurang lebih sekitar 98%) padahal pembiayaan sektor ini pada umumnya adalah sektor yang didominasi oleh kelas menengah. Sedangkan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang didominasi usaha mikro dan kecil porsi pembiayaannya masih sangat kecil (kurang lebih 1%). Hal ini menunjukkan bahwa akses usaha mikro dan kecil untuk pembiayaan atau kredit dari Lembaga Keuangan Mikro (bank) masih sangat kurang.



3.2.3. Model pengembangan UMK dan Pemberdayaan LKM di Kabupaten Fakfak

Model pengembangan usaha mikro di Kabupaten Fakfak sedikit berbeda dengan model yang dihasilkan di Kabupaten Manokwari. Namun demikian tujuan yang diharapkan adalah sama untuk menjembatani kekurangan pelaku usaha mikro Papua dalam mengakses kredit yang ditawarkan di LKM perbankan. Proses pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha Mikro yang dilakukan di Kabupaten Fakfak dilakukan dengan memanfaatkan instansi teknis terkait yang sesuai dengan bidang usaha mikro yang ada, yang dikoordinir melalui Bappeda Kabupaten Fakfak. Untuk menyatukan potensi pemberdayaan masyarakat oleh *stakeholder* di Kabupaten Fakfak, maka diperlukan sebuah lembaga yang disebut sebagai Lembaga Intermediasi Kredit Usaha Mikro. Lembaga intermediasi tersebut terdiri dari unsur-unsur pemerintah (dinas teknis terkait), LKM (Bank dan Non-Bank), LSM/NGO, dan UMKM. Lembaga intermediasi tersebut dapat berperan sebagai inkubator bisnis yang akan berperan dalam pelatihan dan pendampingan pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usaha hingga mendapatkan akses kredit LKM.

Hasil kajian dan lokakarya yang dilakukan di Kabupaten Fakfak memunculkan beberapa lembaga yang potensial berperan sebagai inkubator bisnis di Kabupaten Fakfak. Gambaran mengenai lembaga-lembaga tersebut disajikan melalui Tabel 17.

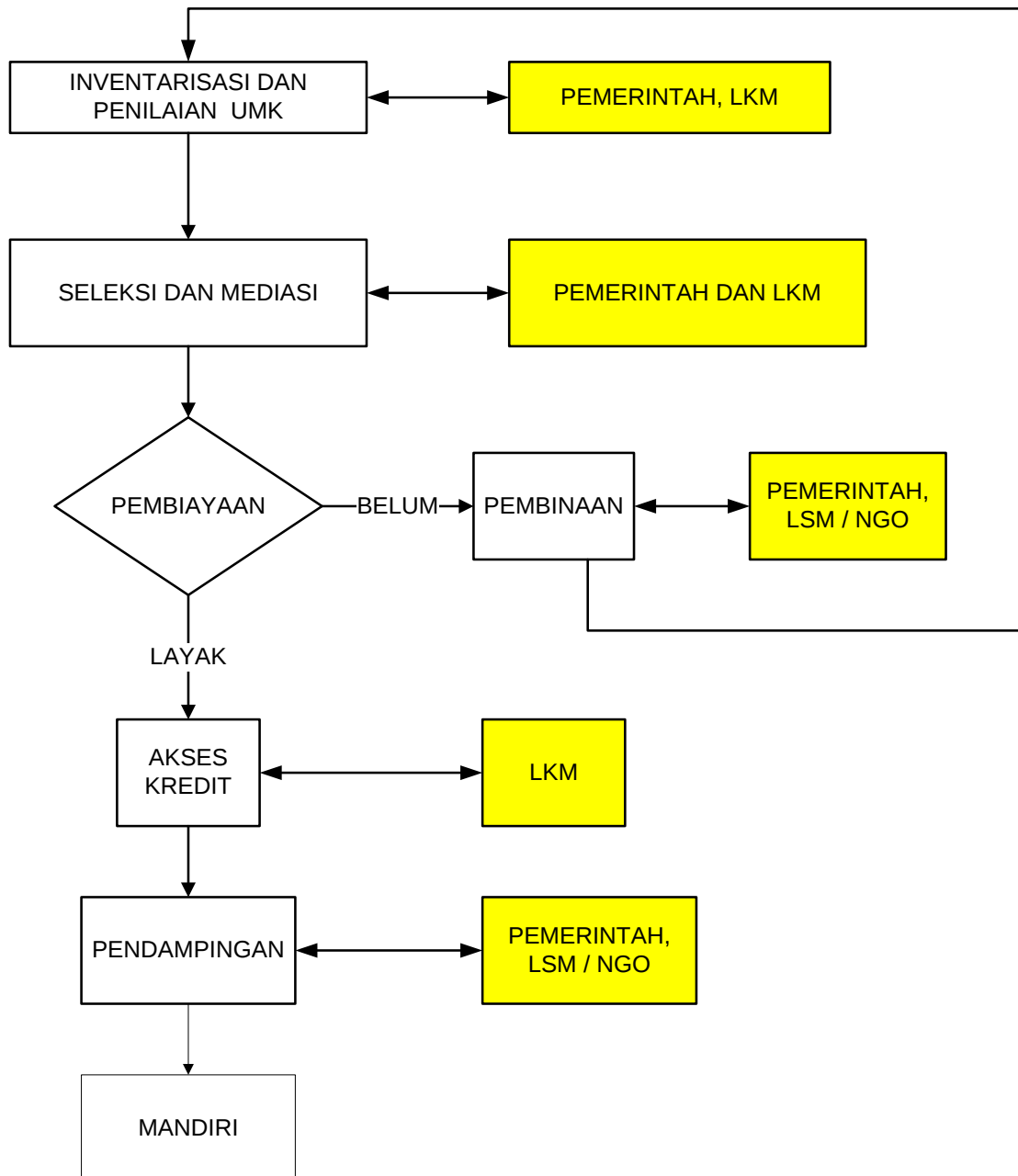


Tabel 17. Lembaga yang potensial berperan sebagai Inkubator Bisnis Potensial di Kabupaten Fakfak

No.	Inkubator Bisnis	Kelebihan	Kelemahan
1.	Koperasi Syangga	- Mengarah ke inkubator bisnis model in wall - Fokus pada Mama-Mama Papua - Mendapatkan pendampingan dari LSM - SDM yang ada belum memiliki kapasitas memadai tentang usaha mikro dan kecil.	- Skalanya tidak besar karena menggunakan dana sendiri dan simpanan anggota - Tidak banyak pengusaha yang dapat direkrut setiap tahunnya. - Jumlah kredit yang disalurkan sangat kecil untuk setiap anggotanya
2.	Yayasan Mitra Hired (YMH) Konsep : Ibu-ibu Papua pengusaha (mikro, dihimpun dalam satu tempat, yaitu pasar. Para pengusaha dilatih dan ditingkatkan kapasitas mereka baik dalam berkoperasi ataupun berusaha	- Mengarah ke inkubator bisnis model in wall - Fokus pada Mama-Mama Papua - Mendapatkan pendampingan dari pemerintah - Telah menerima latihan-latihan dasar tentang koperasi. - Dapat menghimpun dana secara mandiri untuk <i>sustainable</i> program.	- Skalanya tidak besar karena menggunakan dana sendiri dan simpanan anggota - Jumlah kredit yang disalurkan sangat kecil untuk setiap anggotanya
3.	Lembaga Gerakan Masyarakat Papua Lestari (GEMAPALA) Konsep : sebagai lembaga pendamping yang akan memberikan pelatihan, bimbingan dan konsultasi kepada pengusaha-pengusaha Papua dan non Papua yang berada di Kabupaten Fakfak.	- Pengalaman dalam pendampingan usaha mikro-kecil. - SDM yang ada sudah memiliki kapasitas tentang usaha mikro dan kecil. - Sudah berjejaring dengan Lembaga Dana dari luar negeri. - Sudah berpengalaman dalam melatih usaha kecil bekerjasama dengan UNDP	- Tidak memiliki sumberdaya manusia yang berasal dari berbagai bidang ilmu. - Fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dimiliki kurang memadai.



Hubungan antar unsur Lembaga Intermediasi di Kabupaten Fakfak, yang diperoleh dari hasil lokakarya disajikan melalui Gambar 3.



Gambar 3. Skema hubungan fungsional Stakeholder dan tahapan proses akses kredit LKM di Kabupaten Fakfak



Gambar 3 menjelaskan skema hubungan dan peran masing-masing *stakeholder* untuk pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Fakfak serta tahapan proses akses kredit ke LKM. Proses awal pemberdayaan yang dilakukan adalah inventarisasi dan penilaian UMK yang akan mendapatkan akses kredit LKM. Stakeholder yang berperan dalam proses tersebut adalah pihak pemerintah dan LKM Bank. Tahapan selanjutnya adalah proses seleksi dan mediasi meliputi aspek usaha UMK dan memediasi gap yang terjadi antara keinginan pelaku usaha mikro dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Melalui proses ini diharapkan pemerintah mengambil peran baik sebagai penjamin atau mengurangi beban yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha mikro, antara lain misalnya melalui mekanisme subsidi bunga pinjaman.

Pelaku usaha mikro yang terpilih melalui tahapan ini kemudian diberi akses kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengembalian pinjaman. Penentuan jumlah pinjaman tersebut ditentukan oleh LKM yang akan memberikan kredit usaha mikro. Untuk menjamin proses pengembalian dana pinjaman maka harus dilakukan pendampingan baik dalam hal teknis produksi, pengelolaan usaha, maupun pengelolaan keuangan. Untuk proses pendampingan akan melibatkan instansi teknis terkait sesuai dengan bidang usaha mikro yang dikelola dan LSM atau NGO yang berpengalaman dalam melakukan pendampingan masyarakat. Proses pendampingan tersebut akan terus dilakukan hingga pelaku usaha mikro tersebut mandiri, dimana tidak memerlukan lagi bantuan/subsidi kredit mikro.

Untuk pelaku usaha mikro belum terpilih dalam proses seleksi dan mediasi, juga dilakukan pembinaan dalam berbagai aspek pengelolaan usaha, sehingga diharapkan dapat memenuhi persyaratan minimum usaha yang dapat dibiayai oleh perbankan melalui proses intermediasi.



V. PEMETAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

4.1. Lembaga keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Manokwari

Lembaga-lembaga keuangan mikro yang terdapat di Kabupaten manokwari terdiri atas Bank (Umm dan BPR) dan Non-Bank (CU dan Koperasi Simpan Pinjam). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya untuk memberdayaan usaha mikro di Manokwari. Ciri umum usaha mikro adalah keterbatasan dalam hal pembiayaan dan pengelolaan usaha. Dalam hal pembiayaan, LKM dalam mengambil peran yang lebih besar.

Bank-bank yang beroperasi Kabupaten Manokwari hingga Tahun 2012 adalah Bank Papua, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, Bank Mega, BTPN, Bank Danamon Indonesia dan BPR Arfindo. Sedangkan LKM non Bank antara lain KSP dan Credit Union (CU). Namun demikian tidak semua LKM Bank mempunyai kredit usaha mikro dan tidak tersedia kredit khusus untuk pengusaha mikro kecil asli Papua. Untuk LKM CU dan KSP justru semua bergerak dalam pembiayaan usaha mikro dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan bank, namun tingkat bunga yang lebih tinggi.

Penyaluran kredit mikro kecil di Kabupaten Manokwari selama ini yang sebagian besar dilakukan oleh Bank Papua, BRI, Bank Mandiri, BPR Arfindo dan Bank Danamon. Selain LKM perbankan, juga terdapat LKM non Bank yang terdiri atas 9 KSP dan 1 Credit Union, yang berperan dalam penyaluran kredit usaha mikro yang tidak terakses ke perbankan.

Bank Papua Cabang Manokwari hingga bulan Agustus Tahun 2012 telah menyalurkan kredit usaha mikro kecil (UMK) sebesar Rp 28.683.884.639,00. Rincian realisasi penyaluran kredit usaha mikro kecil yang dilakukan oleh Bank Papua Cabang Manokwari disajikan melalui Tabel 6.



Tabel 18. Realisasi penyaluran usaha mikro kecil (UMK) Bank Papua Cabang Manokwari

Jenis Kredit	Realisasi Kredit Mikro Kecil			Debitur		
	Total	Papua	Non Papua	Papua	Non Papua	Total
Mikro		366.314.935		62	63	125
	1.440.438.580		1.074.123.645			
Kecil		428.246.091		4	35	39
	27.243.446.059		26.815.199.968			
Total	28.683.884.639	794.561.026	27.889.323.613	66	98	164

Berdasarkan Tabel 6, proporsi kredit mikro yang disalurkan oleh Bank Papua masih relatif kecil dibandingkan dengan kredit usaha kecil, hanya sekitar 5% dari total kredit mikro kecil yang disalurkan hingga tahun 2012. Demikian halnya dengan kredit usaha mikro yang diakses oleh pengusaha mikro Papua masih relatif kecil dibandingkan dengan pengusaha lainnya (25%), sekalipun jumlah debitur usaha mikro Papua relatif sama dengan debitur lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pinjaman pengusaha mikro Papua masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan pengusaha non Papua. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada kredit usaha skala kecil. Bahkan persentase kredit yang dapat diakses maupun debitur masyarakat asli Papua jauh lebih kecil.

Untuk BRI cabang Manokwari, hingga Agustus tahun 2012 telah menyalurkan kredit mikro sebesar Rp 178.593.730.000 dengan jumlah debitur sebanyak 6325 orang atau rata-rata Rp 28.236.162,85. BRI Cabang Manokwari juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro yang merupakan dana pemerintah pusat yang dipinjamkan ke masyarakat dengan syarat yang lebih lunak dari kredit mikro umum. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan adalah sebesar Rp 17.058.471.000, dengan debitur sebanyak 1834 orang. Data Debitur KUR mikro yang disalurkan oleh BRI Cabang Manokwari pada setiap lokasi unit bank disajikan melalui Tabel 19.



Tabel 19. Data Debitur dan Jumlah KUR mikro yang disalurkan oleh BRI Cabang Manokwari

No	Lokasi BRI Unit	Debitur Papua	Outstanding (Rp)	Debitur Non Papua	Outstanding (Rp)	Total Debitur	Total Outstanding (Rp)
1	Prafi	293	2.425.274.653	245	2.502.642.920	538	4.927.917.573
2	Cendrawasih	15	64.833.066	451	4.318.749.375	466	4.383.582.441
3	Ransiki	69		186		255	
			236.466.263		1.492.213.371		1.728.679.634
4	Manokwari Kota	22	203.224.700	252	2.503.189.023	274	2.706.413.723
5	Manokwari selatan	11	93.971.750	172	1.992.407.150	183	2.086.378.900
	Total	410	3.023.770.432	1306	12.809.201.839	1716	15.832.972.271

Dalam hal penyaluran kredit mikro, BRI Cabang Manokwari lebih besar dibandingkan dengan Bank Papua Cabang Manokwari. Untuk kredit mikro yang disalurkan, tidak tersedia data yang membedakan antara debitur Papua dan Non Papua. Sedangkan untuk KUR mikro yang disalurkan, terlihat bahwa persentase debitur Papua masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan debitur lainnya (sekitar 24%). Hal tersebut semakin menguatkan bahwa umumnya pelaku usaha mikro Papua masih relatif sedikit yang dapat mengakses kredit perbankan sekalipun dengan persyaratan yang lebih mudah. Perlu adanya pendekatan yang spesifik untuk meningkatkan aksesibilitas kredit pelaku usaha mikro Papua untuk mengembangkan usahanya.

Selain kedua bank umum tersebut, di Kabupaten Manokwari juga terdapat BPR Arfindo yang bergerak dalam sektor pembiayaan usaha mikro. BPR Arfindo, yang hingga Agustus Tahun 2012 telah menyalurkan kredit sebesar Rp 103.344.345.000 kepada 4.160 debitur di Manokwari dan Sorong dengan komposisi kredit mikro sebesar Rp.21.293.379.000 (21%), kredit kecil sebesar Rp 48.691.376.000 (47%) dan kredit menengah sebesar Rp.15.096.462.000 (32%). Khusus kredit mikro dipergunakan untuk modal kerja 56%, investasi 13% dan konsumsi 31%. Dari total kredit tersebut,



sekitar 20% dari nasabah kredit mikro (produktif) adalah asli Papua. Proses pembiayaan kredit mikro di BPR Arfindo masih lebih mudah dibandingkan dengan bank umum. Untuk kredit pembiayaan mikro, BPR Arfindo tidak mensyaratkan adanya agunan dan proses yang lebih cepat. Dokumen yang dibutuhkan hanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan keterangan lokasi debitur dari pemerintah setempat. Hal tersebut membuat Bank Arfindo cukup berhasil menjaring nasabah usaha mikro, sekalipun bunga yang diberlakukan lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum.

Untuk LKM non bank di Kabupaten Manokwari terdapat 9 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan 1 Credit Union (CU) Mambuin, yang bergerak dalam usaha pembiayaan mikro. Debitur KSP umumnya adalah masyarakat yang memerlukan dana secara cepat dan mudah, dengan jumlah yang relatif kecil. Hingga Tahun 2012, sebanak 9 KSP yang terdata di Kabupaten Manokwari telah menyalurkan kredit mikro sebesar Rp 3.193.900.000,00 dengan jumlah debitur sebanyak 1630, atau rata peminjaman sebesar Rp 2 juta. Untuk CU Mambuin, hingga tahun 2012 menyalurkan kredit mikro kepada 3411 anggota sebesar Rp 23.913.042.150,00, dengan rata-rata pinjaman sekitar Rp 7 juta.

Berdasarkan data dan uraian tersebut di atas terlihat Bank BRI merupakan LKM yang paling banyak menyalurkan kredit mikro. Namun demikian masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak dapat terjangkau oleh LKM Bank BRI, Bank Papua atau BPR Arfindo. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran pembiayaan mikro, tidak harus melalui LKM bank sebagai satu-satunya wadah, namun dapat juga memanfaatkan wadah yang lebih akrab bagi masyarakat pelaku usaha mikro. Hal yang penting berkaitan dengan LKM adalah bagaimana masyarakat khususnya masyarakat asli Papua di Manokwari yang bergerak dalam sektor usaha mikro kecil dapat mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga yang ringan, proses dan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, peran pemerintah sangat strategis sebagai jembatan penghubung kesenjangan antara



harapan masyarakat dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh LKM khususnya Perbankan. Pendekatan spesifik dalam penyaluran kredit mikro ke masyarakat asli Papua perlu dirancang. Khususnya masyarakat Papua yang sulit mengakses perbankan karena jarak yang jauh, misalnya daerah pengunungan Manokwari seperti Distrik Minyambow yang notabene memiliki sumberdaya alam pertanian hortikultura dataran tinggi yang potensial. Pendekatan yang mungkin dilakukan antara lain perluasan akses perbankan ke daerah-daerah tersebut. Pada saat yang sama perlu dilakukan pendampingan bagi masyarakat sehingga memiliki kemampuan mengelola sumberdaya alam tersebut dan dapat mengakses LKM untuk mengembangkan usaha.

4.2. Lembaga keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Fakfak

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terjadi seiring dengan perkembangan UKM serta masih banyaknya hambatan UKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Selain itu berkembangnya LKM juga tidak terlepas dari karakteristik LKM yang memberikan kemudahan kepada pelaku UKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) non Bank merupakan lembaga yang memiliki potensi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang sangat besar khususnya ekonomi di pedesaan. Terdapat lima alasan yang mendukung pernyataan tersebut. *Pertama*, LKM berada di pedesaan yang dekat dengan petani/pelaku ekonomi sehingga petani/pelaku ekonomi tersebut dapat mengakses LKM dengan mudah. *Kedua*, petani/pelaku ekonomi di desa lebih menyukai proses yang singkat dan tidak melalui banyak prosedur. *Ketiga*, karakteristik usahatani pada umumnya tidak membutuhkan *platfond* peminjaman yang tinggi, sehingga sesuai dengan kemampuan LKM. *Keempat*, dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani sehingga dapat mengucurkan dana secara tepat baik dari segi waktu maupun jumlah. *Kelima*, terdapat keterkaitan sosio-kultural serta adanya



hubungan personal-emosional yang dapat mengurangi sifat moral *hazard* dalam pengembalian kredit.

LKM di Kabupaten Fakfak dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat formalitasnya. Ada tiga bentuk kelompok LKM yang ada di Papua, yaitu:

- a) institusi formal terdiri dari lembaga keuangan yang disahkan oleh pemerintah dan terikat oleh peraturan dan pengawasan oleh pemerintah (Bank Indonesia);
- b) institusi semiformal terdiri dari lembaga-lembaga yang tidak diatur oleh otoritas perbankan tetapi terdaftar atau memperoleh ijin dari pemerintah;
- c) institusi informal terdiri dari perantara keuangan yang beroperasi di luar kerangka peraturan dan pengawasan pemerintah.

Tabel 20. Peta LKM Berdasarkan Kelompok Formalitas di Kabupaten Fakfak

LKM Formal	LKM Semi-Formal	LKM Formal
Bank Komersial :	Koperasi:	Bank Komersial :
Bank BRI	Koperasi Simpan-Pinjam	Bank BRI
Bank Papua	Koperasi Unit Desa	Bank Papua
Bank BNI	Credit Union (CU)	Bank BNI
Danamon Simpan Pinjam	Baitul Mal Wattanwil (BMT)	Danamon Simpan Pinjam
Bank Mega		Bank Mega
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Yayasan	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- BPR Arfindo (<i>Opening Agustus 2013</i>)	Yayasan Mitra Hired (YMH)	- BPR Arfindo (<i>Opening Agustus 2013</i>)
Lembaga Keuangan Non-Bank:	Proyek-Proyek Pemerintah:	Lembaga Keuangan Non-Bank:
- LKD/K (Lembaga Kredit Desa / Kampung)	PNPM	- LKD/K (Lembaga Kredit Desa / Kampung)
	LKM-BUMDES (Respek)	
	PUAP	



Perusahaan
Pembiayaan :
- Pegadaian

Bank-bank komersial tersebut di atas bergerak di sektor keuangan mikro dengan memberikan layanan pinjaman/kredit bagi usaha mikro-kecil dan nasabah berpenghasilan rendah, maka pengelompokan berdasarkan tingkat formalitas LKM, bank-bank komersial (baik bank pemerintah maupun bank swasta) dimasukkan dalam kategori LKM. Contoh BRI merupakan bank komersial milik pemerintah yang sejak lama menciptakan sistem Unit Desa (perbankan mikro), jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank BRI cabang Fakfak total jumlah kredit sekitar Rp. 202.000.000.000,- (**Dua Ratus Dua Milyar Rupiah**) untuk kredit usaha mikro yang memang merupakan core bisnis dari Bank Rakyat Indonesia. Sementara Bank Papua Cabang Fakfak mempunyai skim kredit khusus untuk usaha mikro seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Contoh untuk bank komersial swasta yang secara agresif memberikan pelayanan keuangan mikro di Kabupaten Fakfak adalah Bank Danamon dengan Danamon Simpan Pinjam (DSP).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, BPR merupakan lembaga keuangan kecil artinya dengan menyandang status kecil maka BPR juga mengemban tugas untuk menjalankan kegiatan di sektor keuangan mikro. Sampai laporan ini di buat BPR di Kabupaten Fakfak belum ada, namun berdasarkan informasi BPR Arfak Indonesia (BPR Arfindo) akan membuka cabang di Fakfak pada Bulan Agustus 2013.

Sementara LKM semi-informal merupakan lembaga keuangan resmi yang memperoleh izin dan pengawasan dari instansi pemerintah, misalnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak memberi izin dan mengawasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Kampung (Kopkam) dan koperasi-koperasi lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Fakfak seluruhnya mencapai 171 (seratus tujuh puluh satu) koperasi namun hanya tinggal 25



(dua puluh lima) koperasi yang aktif sampai saat laporan ini di buat. Secara rinci jumlah Koperasi di setiap distrik yang ada di Kabupaten Fakfak disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Peta LKM Semi-formal (Koperasi) di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Distrik

No.	Nama Distrik	Jumlah Total Koperasi	Jumlah Yang Masih Aktif	Keterangan
1,	Distrik Fakfak Tengah	29	5	1 BMT 1 KSP 2. Kopkam 1 Kop. Nelayan
2	Distrik Kokas	40	4	1 KSP 2 Kopermas 1 Kopkam
3	Distrik Fakfak	25	5	2 Kopkam 2 Kop. Primer 1 KPN
4	Distrik Kramomonga	9	1	1 Kopkam
5	Distrik Bomberay	15	6	1 Kopkam 4 KUD 1 KSP
6	Distrik Teluk Patipi	14	1	1 KSU
7	Distrik Karas	11	3	3 Kopkam
8	Distrik Fakfak Barat	16	Nihil	
9	Distrik Fakfak	12	Nihil	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak



Selain LKM semi-formal yang berbentuk Koperasi di Kabupaten Fakfak juga terdapat LKM semi-formal yang dikembangkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dengan Badan Hukum Yayasan umumnya memperoleh ijin dan pengawasan dari Dinas Sosial atau dinas-dinas terkait lainnya sesuai dengan bidang LSM yang bersangkutan. LSM mengembangkan keuangan mikro melalui proyek-proyek resmi yang biasanya didanai oleh bantuan donor, nama yayasan tersebut adalah Yayasan Mitra Hired (YMH) yang terletak di Distrik Fakfak yang memberikan kredit mikro kepada mama-mama Asli Papua yang berjualan sayur di Pasar Sentral Tambaruni.

LKM semi-formal lain yang dikembangkan melalui proyek-proyek pemerintah, seperti PNPM dan Respek juga terdapat di Kabupaten Fakfak, yang mendorong tumbuhnya lembaga keuangan mikro di masyarakat misalnya melalui pembentukan kelompok simpan-pinjam. Selain itu, ada juga perusahaan yang memberikan kredit untuk pengusaha mikro dan kecil, seperti PT. Pegadaian. Ini juga termasuk dalam LKM semi-formal.

Perkembangan LKM di Kabupaten Fakfak dapat dilihat dari tiga hal, yaitu perkembangan jaringan perbankan, perkembangan koperasi, dan perkembangan kredit yang diserap untuk pengembangan UMK. Berdasarkan data di Kabupaten Fakfak sampai dengan tahun 2012 terdapat 6 (enam) bank komersial di Kabupaten Fakfak. Sementara untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sampai laporan ini di buat belum ada di Kabupaten Fakfak, namun berdasarkan informasi yang diperoleh BPR Arfak Indonesia (Arfindo) akan membuka cabang di Fakfak sekitar Bulan Agustus 2013.

Jumlah koperasi di Kabupaten Fakfak selama 4 tahun terakhir periode tahun 2009-2012 terus mengalami kenaikan pasang surut, tahun 2012 mencapai 117 unit atau menurun 30 persen dibanding tahun 2011 yang jumlahnya 172 unit. Tahun 2010 berjumlah 213 unit atau naik 80% dibanding Tahun 2009 yang jumlahnya hanya 117 Unit. Dari jumlah 117 unit koperasi di tahun 2012 terdiri dari 80% persen KUD dan 20



persen non KUD. Walau jumlah koperasi di Kabupaten Fakfak cukup banyak namun sampai laporan ini di buat dari 117 Koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM hanya 25 Koperasi yang masih aktif.

Anggota koperasi pada tahun 2011 mencapai 1.093 orang atau turun 10 persen dibanding tahun 2010 dengan anggota 1.215 orang. Jumlah anggota tersebut menurun drastis sekitar 60 persen dari jumlah anggota tahun sebelumnya (2009) yang mencapai 3.205 orang. Menurunnya jumlah koperasi maupun anggota koperasi di Kabupaten Fakfak terkait dengan kebijakan pemerintah daerah sebelumnya. Pada pemerintahan sebelumnya ada bantuan untuk setiap kampung melalui dana otsus yang diberikan melalui koperasi kampung sehingga pada periode tersebut hampir di setiap kampung dibentuk koperasi kampung, tapi setelah terjadi penggantian pemerintahan yang baru bantuan tersebut tidak ada lagi sehingga lambat laun jumlah koperasi juga makin berkurang.

Untuk perkembangan LKM berdasarkan posisi simpanan dan posisi kredit perbankan dan koperasi. Posisi dana simpanan di bank pemerintah maupun di bank swasta nasional pada periode tahun 2009-2011 mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2011. Posisi dana simpanan di bank pemerintah dan swasta nasional tahun 2011 mencapai 1,065 triliun rupiah atau naik 35% dari posisi 785 milyar rupiah di tahun 2010 walaupun di tahun 2009 jumlahnya mencapai 805 milyar rupiah.

Kondisi kredit perbankan terjadi sebaliknya, Posisi kredit perbankan periode 2009-2011 di bank pemerintah dan bank swasta nasional dan BPR ternyata mengalami penurunan. Posisi kredit perbankan di perbankan turun 10,6 % dari posisi 198,886 milyar rupiah tahun 2010 menurun menjadi 177,776 milyar rupiah di tahun 2011. Posisi tersebut juga menurun sekitar 12% bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 226,749 milyar rupiah. Namun dari jumlah tersebut di tahun 2011 sebagian besar atau 80% (143,087 milyar rupiah) adalah kredit usaha mikro dan kecil, dan sisanya 20% (34,689 milyar rupiah) adalah kredit usaha menengah.



Sementara posisi kredit mikro menurut sektor ekonomi, berdasarkan data Kabupaten fakfak Dalam Angka 2012, tahun 2011 dari total kredit mikro 177,776 milyar rupiah untuk 4 sektor ekonomi yang memperoleh kredit mikro urutan terbesar adalah sektor perdagangan mencapai 115,496 milyar rupiah (65%), Urutan berikutnya sektor jasa-jasa sosial masyarakat mencapai 47,237 milyar rupiah (31%), diikuti sektor perindustrian mencapai 4,895 milyar rupiah (2,7%) dan urutan ke-4 adalah sektor pertanian mencapai 1,8 milyar rupiah (1%).

Walaupun biaya atas dana pinjaman dari LKM non bank lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan, LKM memberikan kelebihan misalnya berupa tiadanya jaminan/agunan seperti yang dipersyaratkan oleh perbankan bahkan dalam beberapa jenis LKM pinjaman didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh LKM, kemudahan yang lain adalah pencairan dan pengembalian pinjaman yang fleksibel yang juga sering disesuaikan dengan *cash flow* peminjam.

Jenis LKM lebih banyak didominasi oleh Unit Simpan Pinjam (USP), namun dari aspek besarnya perputaran pinjaman lebih didominasi oleh perbankan yaitu BRI Unit dan Bank Papua. Hal ini terjadi karena skim kredit yang ditawarkan oleh BRI Unit dan Bank Papua lebih besar daripada USP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Peta LKM di Kabupaten Fakfak berdasarkan Simpanan dan Pinjaman Tahun 2012

Jenis LKM	Jumlah (Unit)	Simpanan (Rp-Juta)	Penyimpan (Orang)	Pinjaman (Rp-Juta)	Peminjam (Orang)	Rata2 Pinjaman
BRI	3	101.260	18.775	149.071	3650	40 Juta
Bank Papua	2	n.a	n.a	110.528	230	400 Juta
KSP	1	74,22	74	69,837	35	3 Juta
Pegadaian	1	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
YMH	1	n.a.	n.a	380	384	< 1 Juta



Dilihat dari besarnya kredit yang disalurkan maka BRI merupakan penyelenggara kredit mikro terbesar dengan jumlah peminjam 3.650, dengan rata-rata pinjaman Rp. 40.000.000. Sedangkan Bank Papua lebih banyak melayani segmen kredit kecil menengah hingga 86% dengan rata-rata pinjaman Rp. 400.000.000,- dan sisanya sekitar 14% adalah jenis kredit mikro dengan rata-rata pinjaman Rp. 15.000.000,-. Koperasi dan perkreditan lain nampaknya benar-benar melayani lapisan paling bawah dari pelaku kegiatan produktif karena secara rata-rata menangani peminjam dibawah 5 juta rupiah.

Permasalahan yang dihadapi oleh LKM terutama LKM bukan bank pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal meliputi keterbatasan sumberdaya manusia, manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien serta keterbatasan modal. Sementara faktor yang bersifat eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, pengalaman yang lemah serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan jangkauan pelayanan LKM non bank terhadap usaha mikro masih belum mampu menjangkau secara luas, sehingga pengembangan LKM non bank yang luas akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi usaha mikro dan kecil.

Penting untuk membedakan antara bank-bank yang berkecimpung di pembiayaan mikro untuk alasan komersial dan yang ikut serta dengan alasan mandat sosial atau respon dari ajakan dan peraturan pemerintah. Ini tidak sesederhana hanya karena kepemilikan pemerintah dengan perusahaan swasta, di mana BRI tetap mayoritas menjadi milik pemerintah namun juga menerapkan agenda komersialnya. Bank Mandiri dan Bank Papua adalah bank pemerintah yang memiliki agenda kedua-duanya (misi sosial dan komersial). Bank Danamon, perusahaan terdaftar di bursa, adalah salah satu dari bank komersial swasta yang memiliki keuangan mikro secara komersial dan secara aktif berkomitmen terus di pangsa pasar tersebut.



Perum Pegadaian adalah perusahaan milik pemerintah yang menyediakan jasa keuangan mikro kepada lebih dari 15 juta peminjam di 2004 melalui jaringan 812 cabang. Pada tahun 2004, Perum Pegadaian memberikan Rp 10,45 triliun (USD 1,05 milyar) dalam bentuk pinjaman, dan menghasilkan keuntungan sebesar Rp.230 milyar (USD 24.7 juta). Pegadaian menawarkan jasa keuangan yang cepat dan efisien, dimana nasabah akan menaruh barang-barang / aset yang dimiliki untuk memperoleh pinjaman tanpa aset tersebut dijual ke Pegadaian. Pegadaian pada umumnya memberikan pinjaman kecil dimana hampir 90% adalah kurang dari Rp 500.000 (USD 50) di 2001.

Jasa-jasa keuangan mikro lainnya adalah termasuk di dalamnya sektor keuangan semi formal yang berisikan ribuan lembaga keuangan non-bank seperti Badan Kredit Desa (BKD), perusahaan keuangan dan asuransi, koperasi, koperasi kredit dan LSM. Ini merupakan kelompok heterogen dan terminology 'lembaga keuangan non-bank' digunakan hanya untuk mengindikasikan bahwa mereka adalah bukan bank, secara bentuk hukumnya. Sehingga institusi-institusi ini tidak dalam regulasi Bank Indonesia dan hanya teregistrasi dan terlisensi oleh badan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.



VI. STUDI KASUS TENTANG KEBUTUHAN PEREMPUAN PENGUSAHA

6.1. Studi Kasus Perempuan Pengusaha Kabupaten Manokwari

Perempuan dalam struktur ekonomi keluarga di Manokwari dan tanah Papua pada umumnya memegang peranan penting. Berbagai penelitian menunjukkan dominannya peranan perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, kenyataan tersebut dapat disaksikan antara lain di Pasar dimana kaum perempuan Papua sangat dominan yang terlibat. Untuk melihat peran dari perempuan sebagai pengusaha dalam kehidupan keluarga di Manokwari maka dilakukan studi kasus terhadap beberapa ibu-ibu pengusaha mikro kecil (Tabel 23).

Tabel 23. Perempuan Pengusaha mikro di Kabupaten manokwari

No	Nama Pengusaha	Jenis Usaha		Lama Usaha
1	Ester Kereway	Kerajinan Tangan		21 tahun
2	Sila Bebari	Pembuatan Asar	Ikan	19 tahun
3	Moni Wanma	Penjualan Tumang dan Bumbu Kuah Papeda	Sagu	19 tahun



4	Sarce Rumaseb	Kerajinan tangan	10 tahun
5	Weli Sorbu	Kios	1 tahun

1. Ibu Ester Kereway

Ibu Ester Kereway adalah salah seorang contoh pengusaha perempuan Papua yang konsisten dan berdedikasi dalam melakukan usaha. Hingga saat ini ibu Ester telah menekuni satu jenis usaha pembuatan berbagai kerajinan tangan khas Papua selama 21 tahun. Sekalipun usia ibu Ester telah mencapai 68 tahun, namun masih tetap melakukan kegiatan usaha dengan dibantu oleh 7 orang anak. Harapannya usaha kerajinan ini kelak dapat diteruskan oleh anak-anak ibu Kereway.



Gambar 4. Ibu Ester Kereway dengan kerajinan tangan yang dihasilkan

Selama melakukan usahanya, ibu Kereway yang biasa dikenal dengan nama Mama Rambut Putih, telah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri untuk



meningkatkan keterampilan dan pengelolaan usaha yang diselenggarakan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Sekalipun pendidikan formal ibu Ester hanya setingkat SMA, namun karena keterampilannya sehingga ibu telah menjadi salah seorang pelatih bidang kerajinan di Manokwari bahkan Papua Barat.

Buah dari ketekunan dan dedikasi ibu Ester dalam berusaha telah dirasakan saat ini. Usaha yang dimulai hanya dengan modal awal Rp 500 dari keluarga, sekarang ini telah menghasilkan omset penjualan hingga Rp 71 juta per tahun, dengan penerimaan bersih sebesar Rp 51 juta per tahun. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dalam hal penjualan, selama ini pemasaran dilakukan secara langsung, atau melalui kegiatan pameran lokal maupun nasional yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan usaha yang dilakukan Ibu Ester masih bersifat kekeluargaan, dimana ibu ester berperan sebagai pengelola usaha sekaligus pekerja, dengan dibantu oleh anggota keluarga (anak). Sekalipun hanya menekuni satu jenis usaha, namun ada keinginan ibu Ester mengembangkan usaha penyediaan atribut-atribut hiasan untuk Gereja, hanya saja masih keterbatasan dalam hal modal. Dalam mengembangkan usaha ibu Ester pernah melakukan pinjaman ke BPR Arfindo dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Manokwari dalam bentuk kredit usaha dan telah dikembalikan dengan melalui hasil usaha.

Sekalipun telah mengembangkan usaha selama 21 tahun, namun ibu Kereway belum melakukan pencatatan keuangan usaha secara tertib dan teratur. Antara keuangan keluarga dan hasil usaha masih bercampur. Hal tersebut dikarenakan, usaha ini merupakan satu-satunya sumber pendapatan keluarga.

Usaha kerajinan ibu Ester bukan tanpa masalah, berbagai masalah yang dihadapi sekarang ini antara lain produksi yang semakin berkurang karena tenaga kerja dari keluarga yang makin berkurang, selain karena faktor usia dari ibu Kereway. Pemasaran



agak tersendat karena sangat bergantung ke pasar lokal yang dilakukan secara tradisional. Pemasaran lewat pameran masih sangat jarang, karena bergantung pada bantuan dari pemerintah daerah. Selain itu teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga kehalusan hasil produksi masih terbatas, sehingga diperlukan peralatan yang dapat digunakan untuk memperhalus hasil kerajinan seperti yang digunakan pengrajin di Bali. Harapan ibu Kereway mendapatkan kesempatan untuk belajar kepada para pengrajin di Bali untuk penghalusan hasil pekerjaan.

2. Ibu Sila Bebari

Ibu Sila Bebari merupakan salah seorang pelaku usaha mikro asli Papua yang mengolah ikan asar. Usaha pembuatan ikan asar ini telah ditekuni oleh ibu Bebari selama 19 tahun, tepatnya dimulai tahun 1994, yaitu ketika ibu mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) salah satu perusahaan kayu lapis di Manokwari.



Gambar 5. Ibu Bebari dengan usaha pembuatan ikan asar



Dengan modal awal 1 juta rupiah, yang diperoleh dari pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam dengan bunga 20% per bulan, Ibu Bebari mulai melakukan usaha pembuatan ikan Asar. Dengan modal awal tersebut, usaha ikan Asar ibu Bebari terus berkembang hingga sekarang dapat membuat 50-100 ekor ikan per hari bergantung pada ukuran dan jumlah ikan segar di pasar. Dengan jumlah tersebut rata-rata dapat terjual 75%-100% per hari, dengan penerimaan bersih sekitar 150 ribu hingga 300 ribu rupiah per hari. Usaha pembuatan ikan asar ini dikelola secara kekeluargaan dengan suami, dan menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga dengan 2 orang anak.

Dalam hal pembagian kerja, suami bertugas untuk pembelian ikan segar dan menyiapkan ikan sebelum diasar. Sedangkan Ibu Bebari yang telah berusia 45 tahun ini bertugas *mengasar* ikan dan memasarkan ikan secara langsung di Pasar. Harapannya produksi dapat ditingkatkan di waktu mendatang. Ibu yang secara formal lulusan SMA ini, tidak berniat untuk mengembangkan usaha yang lain selain ikan Asar ini. Dalam usaha mengembangkan usaha, Ibu Sila Bebari beberapa kali melakukan peminjaman kredit mikro ke Bank Mandiri Cabang Manokwari tahun 2012 dan 2013. Pinjaman tahun 2013 sebesar 20 juta rupiah, dibayarkan selama 1 tahun dengan cicilan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan, atau bunga sekitar 26 persen per tahun. Pinjaman ini digunakan sebagai tambahan modal usaha. Dalam hal peningkatan keterampilan dan pengelolaan usaha, ibu Bebari telah beberapa kali mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah dan perguruan tinggi seperti pelatihan pengolahan ikan, pelatihan pembukuan dan pengelolaan anggaran rumah tangga.

Hasil kegiatan usaha penjualan ikan asar ini, selain dikonsumsi untuk kebutuhan keluarga, sebagian telah disimpan sekitar 30-40% sebagai tabungan di Perusahaan Asuransi Allians untuk anak dan sebagai simpanan keluarga. Hanya saja seperti pengusaha mikro Papua pada umumnya, ibu Bebari tidak melakukan pencatatan keuangan hasil usaha dan tidak ada pemisahan keuangan keluarga dan usaha. Permasalahan usaha yang dihadapi ibu Bebari terutama dalam hal produksi yang tidak



tetap karena bergantung pada jumlah ikan segar, karena itu perlu peralatan penyimpanan beku (*freezer*) yang memadai sehingga dapat menyimpan ikan segar lebih banyak dalam jangka waktu lebih lama. Selain itu saran tempat pembuatan ikan asar ibu Bebari sudah kurang memadai karena sudah cukup lama, sehingga perlu perbaikan namun diperlukan modal untuk itu. Harapannya ibu Bebari dapat memperoleh bantuan peralatan dan pengasaran ikan yang lebih baik.

3. Ibu Moni Wanma

Melihat kebutuhan masyarakat Papua akan sagu sebagai makanan tradisional, maka Ibu Moni Wanma memulai usaha penjualan Sagu tumang (pati sagu basah) dengan bumbu segar untuk ikan kuah kuning. Sagu ini kemudian diolah oleh konsumen menjadi berbagai produk makanan seperti papeda dan sagu lempeng. Ibu Wanma telah menekuni usaha ini selama 19 tahun dengan modal awal sebesar 30 ribu rupiah. Namun usaha penjualan sagu ini sekarang mengalami peningkatan cukup besar, dengan omset penjualan rata-rata 21 juta per bulan. Dari penjualan tersebut ibu Wanma mendapatkan penerimaan bersih sekitar 6 juta rupiah. Penerimaan ini cukup besar karena ditunjang oleh lokasinya yang persis berada dalam lokasi Pasar Ikan Sanggeng Manokwari. Dalam melakukan usahanya, ibu Wanma dibantu oleh 2 orang keluarga.



Gambar 6. Ibu Moni Wanma dengan jualan sagu dan bumbu kuah kuning

Dengan pendidikan yang hanya sampai pada tingkat SD, sampai sekarang ini ibu Wanma yang telah berusia 44 tahun tidak menjalankan usaha lain selain penjualan sagu ini. Tetapi ibu Wanma berkeinginan untuk mengembangkan usaha lain yaitu penjualan ikan asin, jika modal sudah memadai. Selama menjalankan usaha ini ibu Wanma belum pernah meminjam kredit ke LKM baik bank maupun non-bank, karena menganggap modal masih cukup diperoleh dari perputaran uang hasil penjualan. Bahkan kemampuan usahanya dilakukan secara autodidak, tanpa melalui pelatihan-pelatihan tambahan lainnya.

Karena sumber pendapatan keluarga ibu Wanma satu-satunya berasal dari usaha ini, maka pendapata usaha sebagian besar (60%) disimpan sebagai simpanan di bank. Namun dengan alasan keamanan, ibu Wanma tidak berkenan memberikan informasi bank tempat menyimpan dananya. Dalam hal pengelolaan keuangan, ibu Wanma tidak melakukan pencatatan keuangan usaha dengan tertib dan juga tidak pemisahan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha.



Dalam hal pengelolaan usaha, praktis tidak ada permasalahan besar yang dialami. Kecuali untuk pengembangan usaha baru penjualan ikan asin, ibu Wanma masih membutuhkan modal tambahan untuk memulai usaha.

4. Sarce Rumaseb

Kerajinan tangan khusus pembuatan tas dan baju adat papua merukan usaha yang ditekuni oleh ibu Sarce Rumaseb. Dengan pendidikan formal hanya sampai tingkat SMP, ibu Rumaseb memulai usahanya sejak tahun 2003, atau telah berusia 10 tahun. Memulai usaha modal dengan modal awal hanya 160 ribu rupiah, usaha ini sekarang dapat menghasilkan penjualan rata-rata 9 juta rupiah per bulan, dengan keuntungan bersih sebesar 4,5 juta rupiah.



Gambar 7. Ibu Sarce Rumaseb dengan hasil kerajinan tas

Dalam menjalankan usaha, ibu Rumaseb bersama dengan suami yang juga terlibat dalam kegiatan usaha dengan melibatkan 4 orang anak dan 2 orang keluarga lainnya. Ibu Rumaseb lebih fokus dalam pembuatan tas sedangkan suami membuat baju adat Papua. Selain itu, suami bertugas untuk pengadaan bahan baku untuk



pembuatan kerajinan tas dan baju adat. Ke depannya ibu Rumaseb berencana meningkatkan produksi kurang lebih sebesar 20% dari jumlah sekarang. Metode pemasaran yang dilakukan adalah secara langsung dan mengikuti pameran dengan fasilitas dari pemerintah. Untuk mengembangkan usaha tersebut, ibu Rumaseb telah mengajukan kredit ke Bank Papua cabang manokwari, namun hingga sekarang ini belum mendapatkan jawaban persetujuan dari pihak bank.

Selain pendapatan dari usaha ini, pendapatan keluarga juga ditopang oleh penghasilan suami dari sebagai seorang guru. Pendapatan dari usaha yang dilakukan kurang lebih sama dengan penghasilan keluarga lain. Hasil dari usaha tersebut sebagian telah disimpan sekitar 33% dari pendapatan keluarga, hanya saja penyimpanannya dilakukan di rumah (belum memanfaatkan bank). Dalam hal pengelolaan keuangan, ibu Rumaseb belum melakukan pencatatan keuangan yang baik dan tidak ada pemisahan antara keuangan usaha dengan keuangan keluarga.

Permasalahan yang dihadapi oleh usaha ibu Rumaseb antara lain keterbatasan modal untuk membeli peralatan pres dan tempat pemasaran yang kurang memadai. Harapannya dapat memperoleh bantuan peralatan mesin pres untuk memperbaiki kualitas hasil kerajinan.

5. Weli Sorbu

Ibu Weli Sorbu adalah salah satu contoh pelaku usaha Papua yang tidak mengharapkan pemenuhan kebutuhan keluarga hanya dari pendapatan suami. Sekalipun suami adalah pensiunan PNS dan masih diperbantukan di instansi pemerintah hingga sekarang, tetapi ibu Sorbu dalam 1 tahun ini memulai usaha dengan membuka kios sembako dan kebutuhan rumah tangga lain di rumah. Usaha yang dimulai dengan modal awal 20 juta rupiah yang berasal dari modal keluarga, sampai sekarang ini mendapatkan omset penjualan sekita 19,5 juta per bulan dengan pendapatan bersih sebesar 2,5 juta rupiah.



Gambar 8. Ibu Weli Sorbu dengan usaha kios

Dalam menjalankan usaha ibu Sorbu yang mengenyam pendidikan formal samapi SMA ini, dibantu oleh 2 orang anak. Suami yang awalnya ikut terlibat dalam usaha, tidak lagi terlibat karena kesibukan pekerjaan lain. Pengembangan usaha ke depannya hanya untuk menambah produk yang dijual di kios. Untuk menjalankan usaha, ibu Sorbu tidak meminjam kredit ke LKM bank atau non bank dengan berdasarkan pengalaman peminjaman ke LKM terutama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memberatkan karena harus dikembalikan harian.

Sekalipun pendapatan keluarga lebih dominan ditopang dari penghasilan suami, namun bu Sorbu serius untuk menekuni usaha kios. Penghasilan dari kios selama ini dikonsumsi untuk kebutuhan keluarga, sebagian lagi disimpan. Karena untuk kebutuhan rumah tangga sebagian diperoleh dari pendapat suami, maka ibu Sorbu dapat menyimpan pendapatan dari kios sekitar 2 juta rupiah per bulan. Pencatatan keuangan usaha, pada awalnya dilakukan oleh ibu Sorbu, namun sekarang ini tidak lagi dilakukan. Selain itu, keuangan usaha dengan keuangan keluarga tidak dipisahkan. Ke



depannya, ibu Sorbu berharap adanya penambahan modal usaha untuk meningkatkan penjualan barang-barang dalam kios.

6.2. Studi Kasus Perempuan Pengusaha di Kabupaten Fakfak

Peranan perempuan pengusaha di Kabupaten Fakfak juga besar dalam menunjang pendapat keluarga. Hal ini dijumpai dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pelaku usaha mikro di Kabupaten Fakfak. Beberapa pelaku usaha mikro dengan jenis usahanya disajikan melalui Tabel 24.

Tabel 24. Perempuan pengusaha mikro di Kabupaten Fakfak

No	Nama Pengusaha	Jenis Usaha	Lama Usaha
1	Sara Ahek	Kios	8 tahun
2	Marselina Magap	Pengusaha Pala dan Kios Kelontong	33 tahun
3	Marianke Howay	Pengusaha sayuran	19 tahun
4	Mama Golyaf	Pembuatan lempeng Rumput Laut Sagu dan	4 tahun

1. Ibu Sara Ahek

Berbisnis untuk memenuhi kebutuhan keluarga sudah bertahun-tahun dilakoni Mama Sara Ahek. Suami pun mendukung dan terlibat membantu. Usaha yang dilakoni



tersebut adalah membuka kios kelontongan di Distrik Kokas. Mama Sara Ahek memulai usaha Kiosnya tahun 2005 dengan modal awal sebesar 2,5 juta rupiah, yang berasal dari tabungan pribadinya. Kios yang dimiliki Mama Sara Ahek telah memiliki banyak pelanggan. Namun, untuk mengembangkan usahanya yang lebih besar masih terbentur modal yang dimiliki, kemudian beliau bergabung dengan koperasi Syangga yang ada di Distrik Kokas, Mama Sara Ahek yakin bahwa Koperasi Syangga jelas dapat membantu perempuan asli Papua, asalkan perempuan tersebut gigih dan cerdas untuk berusaha.



Gambar 9. Ibu Sara Ahek pelaku usaha kios di Kokas Fakfak

Untuk mengembangkan usaha kelontongnya, Maka pada Tahun 2009 Mama Sara Ahek memanfaatkan pinjaman sebesar 5 juta rupiah dari Koperasi Syangga, dengan jangka pengembalian 12 bulan dan jasa pinjaman 1,5% per bulan flat. Pinjaman tersebut digunakan untuk menambah modal untuk melengkapi Kios kelontongnya.

Menurut Mama Sara Ahek, hal yang paling dibutuhkan untuk saat ini adalah penambahan modal usaha yang akan digunakan untuk pengadaan bahan mentah dan modal kerja lainnya. Walaupun Kiosnya sampai saat ini tidak memiliki catatan



pembukuan yang baik tapi setidaknya penghasilan yang dia peroleh kotor per harinya bisa mencapai 50 ribu sampai dengan 300 ribu rupiah. Namun belum adanya pemisahan antara pengelolaan keuangan kios kelontong dan keuangan rumah tangganya Mama Sara Ahek kadang kala membuat usaha kiosnya tidak dapat berkembang dengan cepat. Mama Sara Ahek sangat membutuhkan pengetahuan dan keterampilan bagaimana cara mengelola keuangan Kios kelontongnya agar bisa berkembang menjadi lebih baik dan lebih besar.

2. Marselina Magap

Marsela Magap adalah salah satu perempuan asli Papua yang memiliki usaha pala dan kios, usaha mama Marselina Magap terletak di Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak. Usahnya ini sudah dirintis sejak tahun 1980 dengan modal awal sebesar 5 juta Rupiah yang berasal dari tabungan pribadi.



Gambar 10. Ibu Marselina Magap pelaku usaha pala dan kios di Fakfak Tengah

Usaha Pokok Mama Marselina Magap adalah membeli dan menampung Pala dari para petani dan juga dari kebunnya sendiri, kemudian menjualnya kembali ke



pengumpul besar yang ada di Kabupaten Fakfak. Sedangkan usaha lainnya yang dikelola oleh Mama Marselina Magap adalah usaha kios kelontong. Dengan dibantu oleh suami dan kedua anaknya Mama Marselina Magap menjalankan usaha Pala dan kios kelontongnya.



Gambar 11. Bunga dan biji pala produksi ibu Marselina Magap

Seiring dengan berkembang dan makin besarnya usaha pala serta kios kelontong yang dimiliki Mama Marselina Magap, maka kebutuhan modalpun kian meningkat dan besar, karena keterbatasan modal yang dimiliki maka Mama Marselina Magap berusaha untuk mencari kredit. Untuk pengembangan usahanya tersebut mama Marselina Magap pada tahun 2012 dengan menjaminkan sertifikat rumah yang ditempatinya ia mencoba mengajukan kredit ke Bank Mandiri Cabang Fakfak, dan mendapat kucuran kredit sebesar 100 juta rupiah dengan jaminan sertifikat rumah



yang ditempatinya sekarang. Tujuan utama peminjaman kredit tersebut adalah untuk pengadaan bahan baku, modal kerja dan perbaikan bangunan atau tempat usaha.

3. Marianke Howay

Mama Marianke Howay merupakan perempuan pengusaha asli Papua yang tangguh dalam berbisnis. Sudah lebih kurang 6 (enam) tahun Mama Marianke menggeluti usaha jualan sayur di Pasar Tambaruni Kabupaten Fakfak, dengan bermodalkan uang pribadinya sebesar 500 ribu rupiah maka pada tahun 2006 Mama Marianke Howay memulai usaha menjual sayur di Pasar Tambaruni Fakfak.



Gambar 12. Ibu Marianke Howay pelaku penjual sayur di Pasar Tambaruni Fakfak



Berbisnis untuk memenuhi kebutuhan keluarga sudah bertahun-tahun dilakoni Mama Marianke Howay. Namun karena keterbatasan modal yang dimiliki maka dari tahun ke tahun usaha Mama Marianke Howay begitu-begitu saja, sementara untuk mengakses pinjaman ke lembaga keuangan yang ada ia tidak memiliki jaminan apa-apa yang bisa dipergunakan untuk mendapatkan pinjaman tersebut.

Sampai akhirnya pada Tahun 2011 tepatnya bulan Juli 2011 berdiri Yayasan Mitra Hiret (YMH) yang tidak jauh dari lokasi usahanya Mama Marianke Howay berani mengajukan pinjaman ke YMH karena persyaratan yang mudah (hanya menyerahkan KTP dan bunga yang relatif kecil dibandingkan LKM lainnya (Bank ataupun KSP). Mama Marianke Howay mendapat fasilitas pinjaman dari YMH sebesar 1 juta rupiah yang harus dikembalikan selama 6 (enam) bulan tanpa harus membayar bunga per bulannya hanya di potong biaya administrasi sebesar 100 ribu rupiah sehingga jumlah yang ia terima bersih adalah 900 ribu rupiah. Enam bulan setelah pinjaman pertama sebesar 1 juta rupiah bisa diselesaikan dengan baik, Mama Marianke Howay mengajukan kredit kembali ke YMH untuk jangka waktu 6 (enam) bulan ke depan, dan mendapat persetujuan jumlah kredit yang disalurkan sebesar 1,5 juta rupiah yang harus di bayar selama 6 bulan tanpa harus membayar biaya bunga hanya di potong biaya administrasi pada saat pencairan sebesar 10% atau 150 ribu rupiah.

Tidak hanya Mama Marianke Howay yang memanfaatkan pinjaman dari YMH tapi hampir sebagian besar pedagang Mama-Mama papua yang ada di Pasar Tambaruni Fakfak juga ikut memanfaatkan pinjaman ini, disamping persyaratan yang mudah, YMH juga melakukan pendampingan kepada mama-mama papua yang menjadi nasabahnya agar mampu mengembalikan pinjamannya. Modal usaha yang lebih besar dengan bunga yang relatif rendah menjadi harapan Mama Howay untuk meningkatkan usahanya di masa mendatang.

4. Mama Golyaf



Mengandalkan modal swadaya yang jumlahnya tidak terlalu besar (1 juta rupiah) Mama Golyaf pada Tahun 2012 mulai merintis usaha pembuatan sagu lempeng di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak. Usahanya ini dilakukan dalam upaya untuk membantu perekonomian keluarga, karena Suami mama Golyaf hanyalah petani rumput laut dengan kapasitas usaha yang tidak terlalu besar dan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.



Gambar 13. Mama Golyaf dengan hasil olahan sagu lempeng di Kokas Fakfak

Sejak awal memulai usaha Mama Golyaf belum pernah memanfaatkan fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik Koperasi apalagi perbankan, namun dia tetap menjalankan usahanya dengan modal yang dimilikinya sendiri. Sagu lempeng yang ia hasilkan umumnya dipasarkan disekitar Kokas dan Kota Fakfak, dengan kapasitas produksi 200 kg sagu lempeng per Bulan Mama Golyaf bisa mendapat keuntungan antara 500 ribu sampai 1 juta rupiah. Keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, di tengah



ketidakpastian pendapatan suaminya yang menjadi petani rumput laut, dikarenakan harga rumput laut yang masih jauh di bawah harga rumput laut pada umumnya. Hal ini disebabkan karena pengumpul rumput laut yang ada di kokas masih di monopoli oleh seorang pengumpul rumput laut saja sehingga harga yang ditentukan tidak mengikuti harga pasar yang berlaku.



Gambar 14. Sagu Lempeng hasil olahan Mama Golyaf

Para petani rumput laut termasuk salah satunya suami dari Mama Golyaf mau tidak mau harus menjual hasil budidaya rumput lautnya ke pengepul tersebut karena tidak ada pengepul yang lain. Namun demikian Mama Golyaf tetap bersemangat untuk menjalankan usaha sagu lempengnya dalam upaya membantu ekonomi keluarganya, walaupun saat ini dia harus mendatangkan bahan baku sagu dari Bintuni dan sekitarnya.

Mama Golyaf menjalankan usaha sagu lempengnya hanya sendirian dan kadang-kadang juga dibantu suaminya apabila kebetulan suami tidak sibuk dengan budidaya rumput lautnya. Dengan segala kesederhanaan keluarga Mama Golyaf tetap menjalankan usahanya dengan modal seadanya karena belum pernah mengajukan ataupun ditawarkan fasilitas kredit baik dari koperasi maupun lembaga perbankan yang ada di Distrik Kokas.



Gambar 15. Produksi Rumput Laut keluarga Mama Golyaf

Mama Golyaf memang sudah terampil dalam memproduksi sagu lempengnya sendiri untuk saat ini beliau memerlukan bantuan tambahan modal dalam rangka memperbesar kapasitas usahanya, di samping itu juga dia memerlukan bimbingan dalam hal manajemen terutama menyangkut manajemen keuangan agar bisa mengatur keuangan usahanya sehingga pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik. Teknik budidaya rumput laut yang baik pun masih dibutuhkan untuk meningkatkan produksi keluarga mereka.



V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil lokakarya dan observasi yang dilakukan mengenai situasi dan kondisi pengembangan usaha mikro masyarakat asli Papua dan pemetaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Manokwari dan Fakfak, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Umumnya pelaku usaha mikro masyarakat asli Papua baik di Kabupaten Manokwari maupun di Fakfak memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan mikro yang tersedia pada Lembaga Keuangan Mikro formal khususnya Bank.
2. Terbatasnya akses pembiayaan tersebut disebabkan antara lain kurangnya kapasitas pelaku UMK Asli Papua dalam hal: pengelolaan usaha, keuangan, akses pasar, akses informasi, tidak adanya pencatatan keuangan, ketidakmampuan memenuhi persyaratan formal pembiayaan, tidak memiliki jaminan sebagai salah satu persyaratan formal pembiayaan, dan ketidakmampuan pengembalian pinjaman.
3. Perlu mekanisme pembiayaan khusus bagi pelaku usaha mikro masyarakat asli Papua melalui LKM Bank maupun non Bank.
4. Pembiayaan mikro bagi pelaku usaha di Kabupaten Manokwari dan Fakfak dapat dilakukan melalui LKM Bank maupun non Bank (Koperasi dan CU).
5. Dalam struktur pembiayaan kebutuhan rumah tangga, perempuan pengusaha Papua umumnya memegang peranan penting dan strategis.

Dari hasil kesimpulan tersebut maka direkomendasikan bagi Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Fakfak untuk memfasilitasi pembentukan lembaga khusus yang dapat mengintermediasi kebutuhan akses pembiayaan mikro pelaku usaha



dengan LKM Bank dan non Bank, sekaligus menjadi wadah penguatan kapasitas dan pemberdayaan usaha mikro masyarakat. Pemberdayaan usaha mikro masyarakat asli Papua harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan semua stakeholder terkait yaitu pemerintah, LKM, Perguruan Tinggi dan LSM/NGO.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Penelitian di Kabupaten Manokwari









Lampiran 2. Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Penelitian di Kabupaten Fakfak





